ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KEMITRAAN USAHA TERNAK AYAM BROILER DI DESA SIMBATAN KECAMATAN SARIREJO KABUPATEN LAMONGAN

SKRIPSI

Oleh:

Mufidaroin NIM. C72214089



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mufidaroin

NIM : C72214089

Fakultas/ Jurusan/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi

Syariah/Hukum Perdata Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem

Kemitraan Usaha Ternak Ayam Broiler Di Desa

Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten

Lamongan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Januari 2018

Saya yang menyatakan,

8AFF623640918

ENAMRIBURUPIAH Mufidaroin

NIM. C72214089

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Kemitraan Usaha Ternak Ayam Broiler Di Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan", yang ditulis oleh Mufidaroin NIM. C72214089 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 18 januari 2019

Pembimbing,

Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mufidaroin NIM. C72214089 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 06 februari 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag

NIP: 196303271999032001

Penguji II

Dra. Nurhayati, M.Ag

NIP:196806271992032001

Penguji III

Drs. Sumarkan, M.Ag

NIP: 196408101993031002

Penguji IV

Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH.

NIP: 198905172015031006

Surabaya,14 februari 2019 Mengesahkan, Fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Surabaya

Dekan

Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP: 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, sava:

Sebagai sivitas aka	dennka Onv Sunan Amper Surabaya, yang bertanda tangan di bawan ini, saya.
Nama	: Mufidaroin
NIM	: C72214089
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address	: Mufid1996@gmail.com
UIN Sunan Ampe	igan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan I Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah : □ Tesis □ Desertasi □ Lain-lain ()
	slam Terhadap Sistem Kemitraan Usaha Ternak Ayam Broiler di Desa tan Sarirejo Kabupaten Lamongan

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Februari 2019

Penulis

(MUFIDAROIN)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul " Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Kemitraan Ayam Broiler Di Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan" ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana praktek sistem kemitraan usaha ternak ayam broiler di Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan dan analisis hukum Islam terhadap praktek sistem kemitraan usaha ternak ayam broiler di Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan.

Data penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Peneltian ini menggunakan pola pikir deduktif yaitu memaparkan terlebih dahulu landasan teori tentang akad *shirkah* untuk menganalis fakta empiris terkait sistem kemitraan usaha ternak ayam broiler selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: *Pertama*: Praktek kemitraan usaha ternak ayam broiler di Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan merupakan kemitraan inti plasma dimana perusahaan sebagai inti dan peternak sebagai plasama. Perusahaan sebagai inti menyediakan sarana produksi berupa DOC, pakan, obat-obatan serta memberikan pembinaan teknis dan management kepada peternak, sedangkan plasma menyediakan kandang, tenaga kerja dan peralatan kandang lainnya yang dibutuhkan. Plasma memperoleh keuntungan dari segi permodalan sedangkan inti diuntungkan karena dapat memasarkan hasil panen. *Kedua*: praktek kemitraan usaha ternak ayam broiler di Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan tidak sesuai dengan *shirkah* karena hasil diberikan sebelum keuntungan nyata diperoleh dan adanya ketidakjelasan keuntungan/kerugian yang diperoleh oleh perusahaan.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka kepada perusahaan (inti) hendaknya membuat kontrak perjanjian yang sesuai dengan prinsip syariah serta melibatkan peternak dalam membuat perjanjian agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

DAFTAR ISI

SAMPUL D	ALAM	i
PERNYAT <i>A</i>	AAN KEASLIAN	ii
PERSETUJU	UAN PEMBIMBING	iii
PENGESAH	IAN	iv
MOTTO		V
ABSTRAK.		vi
KATA PEN	GANTAR	vii
DAFTAR IS	SI	ix
DAFTAR TI	RANSLITERA <mark>SI</mark>	xii
BAB I	PENDAHUL <mark>U</mark> AN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
	C. Rumusan Masalah	9
	D. Kajian Pustaka	10
	E. Tujuan Penelitian	
	F. Kegunaan Hasil Penelitian	13
	G. Definisi Operasional	13
	H. Metode Penelitian	14
	I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II	PERIKATAN DAN KEMITRAAN DALAM HUKUM ISLAM	22
	A. Perikatan dalam hukum islam	22
	1. Pengertian perikatan (Akad)	22
	2. Rukun dan Syarat Akad	26
	3. Asas-asas Hukum Perikatan Islam	27

	4. Macam-macam Akad	36
	5. Akhir Akad	37
	B. Kemitraan dalam hukum islam (<i>Shirkah</i>)	38
	1. Pengertian Shirkah	38
	2. Dasar Hukum <i>Shirkah</i>	39
	3. Macam-Macam Shirkah	40
	4. Sebab-Sebab yang membatalkan <i>Shirkah</i>	44
BAB III	SISTEM KEMITRAAN USAHA TERNAK AYAM BROILER DESA SIMBATAN KECAMATAN SARIREJO KABUPATI	
	LAMONGAN	45
	A. Gambaran Umum Desa Simbatan	37
	B. Profil PT Semesta Mitra Sejahtera	50
	C. Latar Belakang kemitraan Usaha Ternak Ayam Broiler	51
	D. Akad Dalam Kemitraan	
	E. Realisasi Akad	57
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTE KEMITRAAN AYAM BROILER DI DESA SIMBATA KECAMATAN SARIREJO KABUPATEN LAMONGAN	AN
	 A. Analisis Akad Kemitraan Usaha Ternak Ayam Broiler Di Do Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan B. Analisis Realisasi Akad Kemitraan Usaha Ternak Ayabroiler di Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupat Lamongan 	63 am ten
BAB V	PENUTUP	72
	A. Kesimpulan	72
	B. Saran	74
DAFTAR PU	STAKA	75
LAMPIRAN		
DAFTAR GA	AMBAR	X
DAETAD TA	DEI	37 i

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical term) yang berasal dari bahsa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1.	1		ط	t}
2.	ب	b	ظ	z}
3.	Ü	t	ع	4
4.	ث	th	ۼ	gh
5.	E	j	پ	f
6.	7	h}	ؿ	q
7.	Ċ	kh	ؿ	k
8.	د	d	ؿ	1
9.	ذ	dh	-	m
10.	3	r	Ē	n
11.	ر.	Z	গ্ৰ	w
12.	<u>w</u>	S	ق	h
13.	ش	sh	ç	,
14.	ص	s{	ي	у
15.	ض	d{		

Sumber:

kate L. Turabian A. Manual of Writers of Term Papers, Disertations (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
-	fath{ah	a
-	kasrah	i
-	d{ammah	u

Catatan: Khusus untuk hamzah, penggunaan apostrof hanya berlaku jika hamzah berharakat sukun atau didahului oleh huruf berharakat sukun. Contoh: iqtida' (المربة الهربة)

2. Vokal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.	
يلًـٰ"	fath)ah dan ya'	ay	a dan y	
وائ	fath]ah dan wawu	aw	a dan w	

3. Vokal Panjang (mad)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
J	fa <mark>th</mark> ah dan alif	a>	a dan garis di atas
يوٍ۩	kasrah dan ya'	Ď	i dan garis di bawah
ول 🖺	d{a <mark>m</mark> mah dan wawu	u>	u dan garis di atas

Contoh : al-jamā'ah (اوناماله) : takhyi٦ (اونها) : yadu>ru (ودعاره)

C. Ta' Marbūtah

Transliterasi untuk tā' marbūtah ada dua:

- 1. Jika hidup (menjadi mud)vf) transliterasinya adalah t.
- 2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah h.

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, phrase (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (initial letter) untuk nama, tempat, judul buku dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang hidup bermasyarakat dan tidak akan bisa hidup sendirian.¹ Manusia memerlukan pertolongan satu dengan yang lainnya dan persekutuan — persekutuan dalam memperoleh kemajuan. Islam membenarkan seorang muslim menggunakan uangnya untuk usaha- usaha yang baik dan dibolehkan menyerahkan modalnya kepada kelompok usaha yang tergabung dalam badan usaha seperti koperasi maupun paguyuban/ kelompok untuk bekerjasama kepada orang yang lebih ahli baik berupa perusahaan, perdagangan, peternakan, pertambangan, dan berbagai kegiatan produktif lainya. Sebab di antara pekerjaan — pekerjaan tersebut ada yang sangat membutuhkan banyak tenaga, pikiran dan modal. Dalam Alqur'an dan Assunnah terdapat pengakuan masalah ekonomi dengan maksud memberi arah bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana dalam firman Allah Swt.

QS. Al-Mulk:15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

1

¹ Arief, Abd Salam. *Pembaharuan Pemikiran Hukum* Islam: *Antara Fakta dan Realita* (Yogyakarta: LESFI, 2003), 83.

Artinya:

"Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) di bangkitkan."²

Hukum Islam mengatur hubungan kepentingan antar sesama manusia yang menyangkut aktivitas ekonomi melalui petunjuk fikih muamalah yang memuat norma dasar sebagai pedoman, adapun operasionalisasinya secara terperinci diserahkan kepada umat manusia sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan mereka. Dengan demikian, praktek muamalah dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, sewa menyewa dan lain sebagainya. Sedangkan muamalah, dilihat dari pengertiannya dalam arti luas adalah aturan – aturan (hukum) Allah Swt. Untuk mengatur manusia dalam kaitanya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.³

Salah satu bentuk kerjasama bagi hasil dalam hukum Islam adalah Shirkah. Shirkah adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga ataupun lahan. Akan tetapi dalam kerjasama bisa saja salah satu pihak memberi modal saja dalam hal ini bisa juga disebut sebagai Shirkah inan.⁴

.

² Tim penyelenggara penerjemah alquran, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd Ii Thiba'at al-Mushaf al-Syarif, 1418) H, 955

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafino Persada, 2008), 2.

⁴ http://id.m.wikipedia.org//wiki/musyarakah.html, diakses pada tanggal 26 mei 2018

Dalam *Shirkah inan* bukan hanya dalam pembagian hasil dibagi sesuai dengan kesepakatan akan tetapi dalam hal kerugian juga dilakukan hal yang sama. Hal ini bertujuan agar tercapainya unsur saling rela dalam kerjasama itu sendiri dan tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dalam kemitraan. Apabila ada salah satu pihak yang merasa dirugikan maka kemitraan bisa dikatakan gagal atau tidak sah.

Menurut fatwa DSN MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017, *Shirkah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dan atau modal usaha (*ra's al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional.⁵

Macam-macam *Shirkah* secara garis besar menurut Sayid Sabiq, *Shirkah* dibagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) Shirkah amlak yaitu dua orang atau lebih yang memiliki barang tanpa adanya akad, Shirkah amlak ini ada dua macam yaitu:
 - a. *Shirkah ikhtiari* (sukarela), yaitu kerjasama yang muncul karena adanya kontrak dari da orang yang bersekutu, seperti apabila seseorang membeli, berwasiat atau menghibahkan sesuatu kepada dua orang lain, dan mereka menerimanya, Maka dua orang sebagai penerima barang tersebut telah ber *Shirkah* dalam hak milik.

•

⁵ Fatwa DSN MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 diakses pada tanggal 26 mei 2018

- b. *Shirkah ijbāri (*paksaan), yaitu *Shirkah* yang ditetapkan kepada dua orang atau lebih yang bukan didasarkan atas perbuatan keduanya, misalnya dua orang yang menerima warisan, maka dua orang tersebut telah ber*Shirkah* dalam hak milik.
 - 2) Shirkah 'uqud (berdasarkan akad) yaitu ikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam penanaman modal dan pembagian keuntungan.

Sabiq membagi Shirkah 'uqud ini menjadi empat macam yaitu:

- a. Shirkah al 'inan
- b. Shirkah al-m<mark>uwafaw</mark>adah
- c. Shirkah al abdan
- d. Shirkah al<mark>-w</mark>uju<mark>h⁶</mark>

Usaha ternak ayam sebagai salah satu unit produksi dan usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya, tidak terlepas dari lingkup kajian ilmu hukum (fikih), karena di dalam usaha ternak ayam broiler terdapat interaksi antara beberapa subjek hukum yaitu peternak, bandar dan perusahaan yang dapat digolongkan ke dalam sebuah tindakan hukum, yang lahir tak hanya sebagai konsekuensi suatu kegiatan ekonomi (produksi, distribusi dan konsumsi) tapi juga merupakan sebuah hubungan hukum yang mempunyai akibat hukum tertentu.

Belakangan ini usaha ternak ayam broiler sudah tidak lagi menjadi usaha mandiri / perseorangan tapi sudah menjadi sebuah usaha kemitraan karena

⁶ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid XII (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 317

didalamnya terdapat interaksi antara peternak dengan perusahaan yang pada akhirnya menimbulkan suatu kesepakatan /perjanjian.

Pada usaha ternak ayam broiler dengan modal yang kecil, peternak akan sangat bergantung pada perusahaan pemilik modal karena perusahaan bisa menjamin keberlangsungan produksi. Meskipun ada yang mempunyai modal sendiri namun jumlahnya sangat terbatas, keadaan ini dikarenakan peternak harus menyediakan DOC, pakan, obat-obatan, kandang dan peralatan lainya secara mandiri yang tak mampu dipenuhi karena dihadapkan pada keterbatasan modal usaha.

Untuk memenuhi itu semua, biasanya peternak membuat suatu perjanjian atau kontrak usaha kemitraan dengan perusahaan atau koperasi yang bergerak di sektor peternakan ayam sebagai pemodal untuk mendanai atau menyediakan segala kebutuhan dalam produksi peternakan ayam. Usaha kemitraan ternak ayam broiler merupakan salah satu alternatif usaha yang dapat dilakukan karena waktu usaha relatif cepat, hemat lahan, dan dapat dilakukan secara intensif dengan padat modal dan teknologi.

Poultry shop (PS) adalah perusahaan yang bergerak dibidang industri dan produksi peternakan unggas. tidak hanya berproduksi dalam pembibitan unggas saja, poultry shop (PS) juga menjual berbagai macam kebutuhan peternakan seperti pakan, obat - obatan dan vitamin.⁷ Selain penyedia kebutuhan peternakan Poultry shop (PS) juga berperan sebagai penyuluh, pengontrol, pengawas dan membina peternak dari pertama kali DOC masuk

⁷ Santoso, Hari dan Surdaryani, Titik. *Pembesaran Ayam Pedaging hari per hari di kandang Panggung Terbuka* (Jakarta: Penebar Swadaya, 2009), 8.

sampai siap untuk dipanen. Hal ini menunjukan bahwa perusahan tidak hanya menyediakan modal awal saja setelah itu membiarkan peternak tetapi lebih dari itu perusahaan ingin menjalin hubungan yang baik dengan peternak sehingga operasional yang dilakukan bersama – sama dari hulu sampai ke hilir. Dengan adanya hubungan tersebut maka kualitas produk yang unggul akan terjamin. Dengan kemudahan fasilitas yang didapatkan dari *Poultry Shop (PS)*, banyak peternak yang dulunya peternak secara mandiri beralih menjadi peternak mitra. Tidak terkecuali peternak ayam broiler di Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo kabupaten Lamongan.

Adapun kemitraan atau *Shirkah* yang dilakukan di Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan adalah kemitraan dalam usaha ternak ayam broiler antara pihak peternak dengan pihak *Poultry Shop (PS)*. Dalam hal ini pihak *Poultry Shop (PS)* bermodal anakan ayam broiler, pakan ternak, vitamin dan obat – obatan ke peternak (pihak pengelola), sedangkan peternak juga mengeluarkan modal untuk kandang serta tenaga untuk memelihara ayam – ayam tersebut agar tumbuh dan siap untuk dijual.⁸

Dunia bisnis, tak asing jika kita sering mendengar yang namanya untung dan rugi. Begitu pula dalam bisnis ayam broiler, apabila harga ayam dipasar melonjak naik maka perusahaan untung, sebaliknya jika harga ayam broiler dipasaran turun drastis perusahaan akan mengalami kerugian besar-besaran. Tak hanya itu, pada kenyataannya bahkan pihak perusahaan akan menjual beberapa mobil operasionalnya untuk membayar gaji karyawannya. Lain

⁸ Bapak rofiq, Wawancara, Lamongan, 22 September 2018.

.

halnya dengan pihak peternak, tak peduli dengan harga dipasaran naik atau turun maka pihak peternak tetap (flat). Namun pada hakikatnya, dalam *Shirkah* keuntungan akan dibagi diantara para mitra usaha dengan bagian yang telah ditentukan oleh mereka. Pembagian keuntungan tersebut bagi setiap mitra usaha harus ditentukan sesuai bagian tertentu atau presentasi. Tidak ada jumlah yang pasti yang dapat ditentukan bagi pihak manapun diawal akad.

Faktanya tidak demikian, inti (*Poultry Shop*) akan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya apabila harga ayam dipasaran naik, sebaliknya pemilik modal akan mengalami kerugian apabila harga ayam dipasaran turun drastis, lain halnya dengan peternak yang akan mendapatkan keuntungan tetap tidak tergantung pada harga dipasaran. Padahal dalam perjanjian yang dibuat tertulis harga ayam akan mempertimbangkan perhitungan biaya dan perkembangan pasar. Oleh karena itu, jelas terlihat pihak mana yang semakin dikayakan dan pihak mana yang hanya jalan ditempat (stagn) atau dirugikan. Karena pihak Poultry Shop yang latar belakang lebih kuat baik dari modal, SDM dan management menentukan seluruh isi perjanjian sedangkan plasma hanya dapat menerima saja. Dalam kenyataannya peternak menjadi pihak yang lemah posisinya karena kontrak kemitraan yang diberikan merupakan aturan baku yang dibuat oleh inti untuk diterima tanpa ada perundingan mengenai isi kontrak.

Pada penelitian ini peneliti akan menjadikan *Ploultry shop (PS)* dan peternak sebagai subjek penelitian dan kontrak perjanjian kemitraan sebagai

⁹ Bapak Rofiq, Wawancara, Lamongan, 09 novemeber 2018

.

obek penelitian. Namun peneliti ingin memfokuskan penelitian pada kontrak perjanjian kemitraan karena dari surat kontrak kerjasama tersebut akan terjadi sebuah perjanjian yang akan menimbulkan masalah hukum sehingga penulis beranggapan subjek tersebut layak untuk dijadikan penelitian.

Berangkat dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pelaku akad kemitraan antara *Poultry Shop (PS)* dengan peternak dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap Sistem Kemitraan Usaha Ternak Ayam Broiler di Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, dapat di identifikasi beberapa masalah yang berkaitan dengan sistem kemitraan usaha ternak ayam broiler di Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

- Latar Belakang kemitraan antara peternak ayam dengan pihak Poultry Shop (PS)
- 2. Akad yang digunakan dalam kemitraan antara peternak ayam dengan pihak *Poultry Shop (PS).*
- 3. Kontrak perjanjian antara peternak ayam broiler dengan pihak *Poultry Shop (PS)*.
- 4. Akibat yang ditimbulkan dengan kerjasama antara peternak ayam broiler dengan pihak *Poultry Shop (PS)*.

- 5. Praktik kemitraan antara peternak ayam broiler dengan pihak *Poultry Shop* (*PS*).
- 6. Akibat yang ditimbulkan dengan kemitraan antara peternak ayam broiler dengan pihak *Poultry Shop (PS)*.
- 7. Analisis hukum Islam terhadap sistem kemitraan usaha ternak ayam broiler antara peternak ayam broiler dengan pihak *Poultry Shop (PS)*.

Dari beberapa masalah yang sudah diidentifikasi tersebut, penulis membatasi penelitian ini hanya pada dua masalah saja, yaitu:

- Praktik sistem kemitraan usaha ternak ayam broiler di Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan.
- 2. Analisis hukum Islam terdapat praktik sistem kemitraan usaha ternak ayam broiler di Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan.

C. Rumusan Masalah

Dari pembatasan masalah yang terpetakan, dapat dirumuskan beberapa rumusan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana praktik sistem kemitraan usaha ternak ayam broiler di Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan?
- 2. Analisis hukum Islam terhadap praktik sistem kemitraan usaha ternak ayam broiler di Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh gambaran berkaitan dengan topik yang akan diteliti tentang beberapa penelitian terdahulu

sehingga diharapkan tidak terjadi pengulangan dan duplikasi. Dalam penelusuran yang penulis lakukan ditemukan tiga penelitian yang topiknya.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Handy Putra Utama yang hasilnya dirangkum dalam karya skripsi pada tahun 2009 dengan judul " Analisis Hukum Islam terhadap pola kemitraan dalam usaha peternakan ayam broiler di PT kenongo perdana pasuruan" penelitian tersebut bertujuan untuk menjelaskan dan menjawab bagaimana pola kemitraan dan sistem bagi hasil dalam usaha peternakan ayam broiler di PT. Kenongo Perdana Pasuruan, dan sekaligus menganalisis bagaimana perspektif hukum Islam terhadap permasalah tersebut. Dan penulis menyimpulkan bahwa hukum Islam menganjurkan apabila seseorang memiliki lahan produksi maka ia harus memanfaatkan dan mengelolanya. Sedangkan pola kemitraan yang diterapkan dalam Islam adalah bertujuan saling tolong menolonglah dalam kebahagiaan.¹⁰

Kedua, skripsi pada tahun 2012 yang ditulis oleh nuroini yang berjudul "*Praktik kerjasama pertanian melon di Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo*". Penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan praktik kerjasama pertanian melon yang mana sistem yangdigunakan adalah sistem bunga. Praktik kerjasama ini dianggap tidak sah karena bunga adalah riba yang dilarang oleh agama.¹¹

.

Utama, Handy Putra. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kemitraan Dalam Usaha Peternakan Ayam Broiler Di PT Kenongo Perdana Pasuruan" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009)

¹¹ Nuroini, *Tinjauan Hukum* Islam *terhadap Praktik Kerjasama Pertanian Melon di Desa Trebungan Kabupaten Situbondo*, (Skripsi-- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012),80

Ketiga yaitu skripsi yang ditulis oleh M. Wahyunus Ashari pada tahun 2017 dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Usaha Ternak Ayam potong di desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember", Skripsi ini bertujuan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kerjasama yang dilakukan sesuai dengan pengertian Shirkah akan tetapi ketika mengalami kerugian pembagiannya, penjualan hasil panen tidak dikurangi modal yang dikeluarkan sehingga hasil kotor dibagi 60% untuk pihak pengelola dan 40% untuk pihak pemodal. Ketika mengalami kerugian hanya pihak pengelola yang merasakan kerugian. Menurut pandangan hukum Islam ini tidak sesuai. 12

Walaupun ketiga penelitian tersebut sama-sama meletakkan tentang kemitraan sebagai objek yang diteliti sama seperti penelitian yang akan penulis lakukan, namun penelitian penulis tidak merupakan pengulangan atas apa yang sudah dikaji dalam ketiga penelitian diatas. Disini penulis lebih memfokuskan penelitian pada kontrak perjanjian kemitraan karena dari surat kontrak kerjasama tersebut akan terjadi sebuah perjanjian yang akan menimbulkan masalah hukum sehingga penulis beranggapan subjek tersebut layak untuk dijadikan penelitian. Dimana Hasil dalam akad kerja sama dibagi saat keuntungan di peroleh setelah usaha berjalan, namun pada praktiknya tidak demikian, pembagian hasil ditentukan di awal tidak berubah.

٠

¹²Ashari, M. Wahyunus. "Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Usaha Ternak Ayam Potong di Desa Tanggul Wetan kecamatan Tanggul Kabupaten Jember" (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya,2017)

E. Tujuan Penelitian

Dalam segala jenis kegiatan pastilah memiliki suatu tujuan untuk pencapaiannya. Maka dari itu, dalam melakukan penelitian ini, penulis juga memiliki tujuan untuk mencapainya. Dari rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- Mengetahui praktik sistem kemitraan usaha ternak broiler di Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan.
- Mengetahui Analisis hukum Islam terhadap praktik sistem kemitraan usaha ternak ayam broiler di Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan.

F. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan penelitian diatas maka kegunaan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- Secara Teoritis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang kerjasama dalam hukum ekonomi Islam sehingga dapat dijadikan informasi bagi pembacanya.
- Secara praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan oleh pihak peternak ayam broiler dalam menjalin kemitraan dengan pihak *Poultry Shop (PS)* yang selaras dengan hukum Islam.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah gambaran yang jelas dan konkrit tentang permasalahan yang terkandung dalam pembahasan penelitian, maka diperlukan penjelasan makna dalam penulisan skripsi ini. Definisi kata - kata tersebut adalah:

- Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang bersumber dari alquran,
 Assunnah dan ijtihad ulama' yang wujudnya berupa kitab-kitab fikih berbagai madzhab dan pendapat ahli hukum Islam tentang akad shirkah.
- 2. Sistem kemitraan usaha ternak ayam broiler adalah praktik bisnis usaha peternakan ayam broiler yang dilakukan oleh dua pihak yaitu antara PT.Semesta Mitra Sejahtera (inti) dengan peternak ayam broiler (plasma), menggunakan pola kemitraan inti plasma, dengan pola kemitraan ini plasma memperoleh keuntungan dari segi permodalan sedangkan inti (perusahaan) diuntungkan karena dapat memasarkan hasil produksi, dimana perusahaan menentukan seluruh isi perjanjian sedangkan plasma hanya dapat menerima saja tanpa ada perundingan mengenai isi kontrak.

Jadi, yang dimaksud dengan judul secara keseluruhan adalah analisis dengan menggunakan akad *Shirkah* terhadap sistem kemitraan antara *Poultry Shop* (inti) dan peternak (plasma) yang telah menentukan keuntungan di awal akad.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Reseach*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan pola pikir deskriptif kualitatif Oleh karena itu, penulis memaparkan metode penelitian yang digunakan dengan tujuan untuk memperjelas serta mempertegas arah dan tujuan penelitian ini.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan benuk penelitian lapangan (field research) dimana peulis harus terjun sendiri ke tempat penelitian yaitu peternakan ayam broiler di Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan. Sedangkan Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan pola pikir deskriptif kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, buku-buku, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen asli resmi lainnya. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang kegiatan, sikap serta proses

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta:2008)

yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena-fenomena yang ada sebenarnya.¹⁴

3. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian penulis untuk dikaji adalah sistem kemitraan usaha ternak ayam broiler di Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan.

4. Data yang dikumpulkan. 15

Data yang dikumpulkan yakni data yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah meliputi:

- a. Keadaan geografis, data perekonomian penduduk di lokasi tempat penelitian yaitu masyarakat Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan. Adapun pemilihan lokasi ini didasari karena di desa tersebut kerjasama usaha ternak ayam potong dilakukan.
- b. Data tentang mekanisme kemitraan usaha ternak ayam broiler di Desa
 Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan. Yaitu tentang:
 - 1) Pelaku akad
 - 2) Akad yang dilakukan dalam transaksi
 - 3) Praktik kerjasama usaha ternak ayam broiler
 - 4) Persyaratan dalam praktik kemitraan usaha ternak ayam broiler.
 - 5) Akibat kemitraan usaha ternak ayam broiler
- 5. Sumber Data

¹⁴ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2003), 50

15 Ibid.

Sumber data yakni sumber dari mana data akan digali, baik primer maupun sekunder.¹⁶

a. Sumber Primer

Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan yang diperoleh peneliti dari sumber asli. 17 Pelaku kerjasama usaha ayam broiler diantaranya yaitu:

- 1) Peternak yang melalukan kemitraan usaha ternak ayam broiler sejumlah 3 orang
- 2) Managemen PT. Semesta Mitra Sejahtera

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung, yaitu buku-buku kepustakaan dan catatan-catatan atau dokumen-dokumen tentang apa saja yang berkait dengan Sumber sekunder tersebut adalah sebagai pembahasan ini. berikut:

- 1) Ibnu Rusdy, Bidayatul al-Mujtahid, jilid 4.
- 2) Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu.
- 3) Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah: Jilid 4.
- 4) Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian Dalam Islam

¹⁶ Tim Penyusun Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, *Panduan Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 9

¹⁷ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi* Islam (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2008), 56

- 5) Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah.
- 6) Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian syariah.
- 7) Saiful jazil, Fiqh mu'amalah
- 8) Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam.

6. Teknik Pengumpulan data

a. Observasi

Teknik pengamatan dengan cara mengamati (melihat, memperhatikan, mendengarkan, dan mencatat secara sistematis objek yang diteliti)¹⁸ yang dilakukan untuk pengumpulan data tentang Kemitraan usaha ternak ayam broiler di Desa Simbatan.

- 1) Akad yang dilakukan dalam kemitraan ayam broiler
- 2) Praktik dalam kerjasama usaha ternak ayam broiler
- 3) Sistem pembagian keuntungan dan kerugian dalam usaha kemitraan usaha ternak ayam broiler.

b. Interview

Teknik interview sering kali disebut sebagai teknik wawancara yaitu suatu teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, sesuai dengan data.¹⁹ Teknik ini bertujuan untuk menggali data-data yang akurat terhadap pihak yang melakukan kemitraan usaha ternak

¹⁸ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi* Islam 150

¹⁹ Ibid, 50

ayam broiler di Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan.²⁰

7. Teknik pengelohan data

Tahapan pengolahan data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Organizing

Yaitu suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.²¹ Teknik ini digunakan untuk menyusun data dan mensistematiskan data yang diperoleh tentang analisis hukum Islam terhadap kemitraan usaha ternak ayam broiler.

b. Editing

Yaitu kegiatan memperbaiki kualitas data (mentah) serta menghilangkan keraguan akan kebenaran/ketetapan data tersebut.²² Teknik ini digunakan untuk pemeriksaan kembali data yang diperoleh dari segi kejelasan serta kesesuaian data tentang analisis hukum Islam terhadap kemitraan usaha ternak ayam broiler.

c. Analyzing

Setelah data terkumpul, kemudian langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data, yaitu proses

²⁰ Ibid.

²¹ Sonny Sumarsono, Metode Riset Sumber Daya Manusia (Graha ilmu, 2004), 66.

 $^{^{22}}$ Masruhan, $Metodologi\ Penelitian\ Hukum$ (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 235

penyederhanaan data ke bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami.²³

8. Teknik Analisis Data

Penulis melakukan teknik deskriptif analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kondisi, situasi, atau fenomena yang tertuang dalam data yang diperoleh dari kemitraan usaha ternak ayam broiler di Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan kemudian dianalisis dengan hukum Islam.

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif menganalisis data yang bersifat umum yaitu teori hukum Islam kemudian menganalisisnya dengan data yang bersifat khusus mengenai kemitraan usaha ternak ayam broiler di Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan dan kemudian diambil suatu kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam hasil penelitian ini akan dituangkan dalam laporan berbentuk karya ilmiah skripsi yang sistematika pembahasannya terdiri dari lima bab, sebagaimana berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,

-

²³ Masri Singarimbun dan sofian Effendi, *Metode penelitian survai* (Jakarta: LP3ES, 1989), 263.

tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang kemitraan dan perjanjian dalam hukum Islam yang mana menjelaskan tentang pengertian *Akad*, dasar hukum *Akad*, syarat dan rukun *Akad*, macam – macam *Akad* pengertian *Shirkah*, dasar hukum *Shirkah*, syarat dan rukun *Shirkah*, macam – macam *Shirkah*, berakhirnya *Shirkah*.

Bab ketiga, berisikan gambaran umum tentang sistem kemitraan usaha ternak ayam broiler di Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan, profil perusahaan, profil Desa, latar belakang kemitraan, kontrak perjanjian dalam kemitraan, praktik kemitraan, mekanisme bagi hasil kemitraan, problem dalam kemitraan.

Bab keempat, yaitu berisikan tentang analisis hukum Islam terhadap sistem kemitraan usaha ternak ayam broiler di Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten lamongan. Dalam bab ini penulis menganalisis tentang akad kemitraan usaha ternak ayam broiler di Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan dan analisis tentang realisasi akad kemitraan usaha ternak ayam broiler di Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan.

Bab kelima, penutup sebagai kesimpulan dari hasil penelitian dan saran, Kesimpulan yang dimaksud jawaban dari rumusan masalah dalam hasl penelitian seacara keseluruhan.

BAB II

PERIKATAN DAN KEMITRAAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Perikatan dalam hukum Islam

1. Pengertian perikatan (Akad)

Al-'Aqd (akad/kontrak) berasal dari kata 'aqada-ya'qidu-'aqd[an], jamaknya adalah al-'uqud. secara bahasa Al-'Aqd bermakna ar-rabt (ikatan), al-shadd (pengokohan), at-taqwiyah (penguatan). Jika dikatakan, 'aqada al-habla (mengikat tali), maksudnya adalah mengikat tali satu dengan yang lain, mengencangkan dan menguatkan ikatannya.

Al-'Aqdu juga bisa bermakna al-'ahdu (janji) atau al-mītsāq (perjanjian) Adapun al-'uqdah (jamaknya al-'uqad) adalah obyek ikatan atau sebutan untuk sesuatu yang di ikat. Di dalam al-Quran kata 'aqada disebutkan sebanyak tujuh kali dalam tujuh ayat: kata 'aqada bermakna sumpah (QS al-Nisā': 33 dan al-mā'idah: 89) al-'uqūd bermakna al-'ahdu atau janji (QS al-Baqarah: 1 dan 20: 27); 'uqdah bermakna ikatan (QS al-Falaq: 235, 237). Menurut al-Jashash sumpah disebut 'aqd jika berupa sumpah untuk perkara yang akan datang.²⁴

Pada awalnya kata 'aqada digunakan untuk benda padat seperti tali dan bangunan, namun kemudian dengan majaz isti'ārah kata ini juga diterapkan untuk selainnya seperti: 'aqd al-bay' (akad jual beli), 'aqd al-'ahd

22

²⁴ Saiful Jazil, *Fiqh Mu'amalah* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 63.

(akad perjanjian). 'aqd an-nikāh (akad nikah), dsb. Dalam konteks ini, 'aqada dimaknai sebagai *ilzām* (pengharusan) dan *iltizām* (komitmen atau irtibāth/pertautan).²⁵

Menurut terminologi ulama fiqh, akad dapat ditinjau dari dua segi yaitu secara umum dan secara khusus. Menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, pengertian akad secara umum yaitu:²⁶

Artinya:

"Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan, dan gadai."

Dari definisi yang dikemukakan oleh *fuqahā* Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah ini dapat dipahami bahwa akad itu bisa mencakup *iltizam* (kewajiban) dan *tasarruf shar'i* secara mutlak, baik *iltizam* tersebut timbul dari satu orang atau dua orang.²⁷

Dari definisi yang dikemukakan di atas jelaslah bahwa akad itu adalah ikatan yang terjadi antara dua pihak, yang satu menyatakan ijab dan yang

²⁵ Ibid.

²⁶ Wahbah az-Zuḥaili, *Al-Fiqh Al-Islām wa Adillatuhu*, juz IV (Damsyik: Dār Al-Fikr, 1989), 80.

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2013), 111.

kedua menyatakan qabul, yang kemudian menimbulkan akibat-akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara dua pihak tersebut.

Contoh menimbulkan *iltizam* seperti akad jual beli dan *ijārah*, memindahkannya seperti akad *hiwālah*, mengalihkannya seperti angsuran utang dan menghentikannya seperti membebaskan utang dan mem-fasakh *ijārah* sebelum habis masa sewanya.

Dari definisi yang telah dikemukakan tersebut terdapat tiga istilah yang meknannya saling berkaitan, yaitu kata akad, iltizam dan tasarruf. Yang dimaksud dengan iltizam adalah setiap tasarruf (tindakan hukum) yang mengandung timbulnya hak, memindahkan, mengalihkan, menghentikannya, baik tasarruf tersebut timbul dari kehendak satu pihak, seperti wakaf, dan pembebasan utang, meupun dari kehendak dua pihak, seperti jual beli dan ijarah. Dalam konteks ini, iltizam sama dengan akad dalam pengertian yang umum yang telah dikemukakan di atas, tetapi berbeda dengan pengertian khusus. Akad dalam pengertian khusus merupakan bagian dari iltizam yang timbul dari dua pihak, seperti jual beli dan gadai. Dengan demikian, iltizam lebih umum daripada akad dalam arti khusus, karena iltizam mencakup tasarruf dari satu pihak dak dua pihak. Sedangkan pengertian tasarruf adalah setiap sesuatu yang timbul dari seseorang dengan kehendaknya, baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang oleh syara' dipandang menimbulkan akibat-akibat hukum, baik untuk kepentingan orang tersebut atau bukan. Tasarruf yang timbul berupa ucapan seperti akad jual beli, hibah, dan wakaf. Sedangkan tasarruf yang timbul dari perbuatan seperti menguasai benda-benda mubah, perusakan, dan pemanfaatannya dengan demikian, istilah *tasarruf* lebih umum daripada akad dan iltizam karena ia mencakup ucapan dan perbuatan, *iltizam*, dan *ghair iltizam*.²⁸

2. Rukun dan Syarat Akad

Untuk terbentuknya akad, maka diperlukan unsur pembentukan akad. Hanya saja, di kalangan *fuqahā* terdapat perbedaan pandangan berkenaan dengan unsur pembentuk tersebut (rukun dan syarat akad) Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu:

- 1. Para pihak yang membuat akad (*Al-'Aqīdan*);
- 2. Pernyataan kehendak para pihak (*Ṣīghat 'Aqd*);
- 3. Objek akad (*Maḥallul 'Aqd*);
- 4. Tujuan Akad (Maudu' al-'aqd).²⁹

Fuqaha Hanafiah mempunyai pandangan yang berbeda dengan Jumhur Fuqaha diatas. Bagi mereka, rukun akad adalah unsur-unsur pokok pembentukan akad dan unsur tersebut hanya ada satu yakni şīghat al-'aqd (ijab dan qabul). Al-'Aqidain dan maḥal al-'aqd bukan merupakan rukun akad melainkan lebih tepat dimasukkan sebagai syarat akad. Pendirian seperti ini didasarkan pada pengertian rukun sebagai sesuatu yang menjadi tegaknya dan adanya sesuatu, sedangkan ia bersifat internal (dakhiliy) dari sesuatu yang ditegakkannya. Berdasarkan pengertian ini, maka jika dihubungkan dengan

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...*, 113.

²⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Mu'āmalat,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 95-96.

pembahasan rukun akad, dapat dijelaskan bahwa rukun akad adalah kesepakatan dua kehendak, yakni ijab dan qabul. Seoarang pelaku tidak dapat dipandang sebagai rukun dari perbuatannya karena pelaku bukan merupakan bagian internal dari suatu perbuatannya.

Adapun syarat menurut pengertian Istilah *fuqaha* dan *ushuliyyun* adalah segala sesuatu yang dikaitkan pada tiadanya sesuatu yang lain, tidak pada adanya sesuatu yang lain, sedang ia bersifat eksternal (*khārijiy*). Maksudnya adalah tiadanya syarat mengharuskan tiadanya masyrut. Misalnya kecakapan pihak yang berakad merupakan syarat yang berlaku pada setiap akad sehingga tiada kecakapan menjadikan tidak berlangsungnya akad.³⁰

Masing-masing rukun (unsur) yang membentuk akad, memerlukan syarat-syarat agar unsur itu dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat dimaksud, rukun akad tidak dapat membentuk akad. Dalam hukum Islam, syarat-syarat dimaksud dinamakan syarat-syarat terbentuknya akad (*Shurut al-in'iqād*). Rukun pertama, yaitu para pihak, harus memenuhi dua syarat, yaitu (1) Tamyiz, dan berbilang (*at-ta'addud*). Rukun kedua, yaitu pernyataan kehendak, harus memenuhi syarat (1) adanya persesuaian ijab dan qabul, dengan kata lain tercapainya kata sepakat, dan (2) kesatuan majelis akad. Rukun ketiga, yaitu objek akad, harus memenuhi tiga syarat, yaitu (1) objek itu dapat diserahkan, (2) dapat ditentukan, dan (3) objek itu dapat

Soiful Iogil Figih Mu

³⁰ Saiful Jazil, *Figih Mu'amalah*..., 68-69.

ditransaksikan. Rukun keempat memerlukan satu syarat, yaitu tidak bertentangan dengan shara'.³¹

3. Asas-Asas Hukum Perikatan Islam

Asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis, dan fondasi. Secara terminology, asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atatu berpendapat. Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip, yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Mohammad Daud Ali, mengartikan asas apabila dihubungkan dengan kata hukum adalah kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat, terutama, dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.³²

Ada beberapa asas kontrak (akad) yang berlaku dalam Hukum Perdata Islam, asas-asas tersebut sangat berpengaruh pada pelaksanaan kontrak yang dilaksanakan oleh para pihak yang berkepentingan. Jika asas-asas tersebut tidak terpenuhi dalam pelaksanaan suatu kontrak, maka akan berakibat pada batalnya atau tidak sahnya kontrak yang dibuatnya. Beberapa asas tersebut antara lain:

a. Asas Ilahiah

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Seperti yang disebutkan dalam (QS. Al-Hadid: 4)

³¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, 97-98.

³² Gemala Dewi et al., *Hukum Perjanjian* Islam..., 30.

³³ Saiful Jazil, *Figh Mu'amalah...*, 65.

Artinya:

"Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

Kegiatan muamalat, termasuk perbuatan perikatan, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada Allah SWT. Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Akibatnya, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya, karena segala perbuatannya akan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

b. Asas Kebebasan (*Al-Ḥurriyah*)

Menurut Faturrahman Djamil, Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam dan merupakan prinsip dasar pula dari hukum perjanjian. Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan itu mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun, kebebasan ini tidaklah absolut. Sepanjang tidak bertentangan dengan Syariah Islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan. Syariah Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang di inginkan, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama. Tujuannya adalah untuk menjaga agar tidak terjadi penganiayaan antara sesama manusia melalui akad dan syarat-syarat yang

dibuatnya. Asas ini pula menghindari semua bentuk paksaan, tekanan, dan penipuan dari pihak manapun. Adanya unsur pemaksaan dan pemasungan kebebasan bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian, maka legalitas perjanjian yang dilakukan bisa dianggap meragukan bahkan tidak sah. Landasan asas ini antara lain:

Artinya:

"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS: Albaqarah: 256)

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu." (QS: Al Maidah: 1)

Artinya:

"Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniup kan kedalamnya ruh (ciptaan)-Ku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud." (QS: Al-Hijr: 29)

Artinya:

"Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh." (QS: Al-'Ahzāb: 72).³⁴

Dalam bidang muamalat terdapat kaidah fiqh yang berisikan bahwa "asal sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukan keharamannya". Kaidah ini berlaku untuk bidang muamalat, tetapi tidak berlaku untuk bidang ibadat.³⁵

c. Asas Persamaan atau kesetaraan

Suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sering kali terjadi, bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Seperti yang tercantum dalam (QS. An-Nahl:71)

Artinya:

"Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki."

Hal ini menunjukan, bahwa di antara sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu, antara manusia satu dengan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinnya. Oleh karena itu, setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perikatan. Dalam melakukan perikatan ini, para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan

.

³⁴ Mariam Darus Badzrulzaman et al., *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), 249.

³⁵ Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fighiyah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001),90

atau kesetaraan ini. Tidak boleh ada suatu kezaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut. Dalam (QS. Al-Hujuraat: 13)

Artinya:

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsabangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal."³⁶

d. Asas Keadilan (al-'adalah)

Keadilan adalah salah satu sifat Tuhan dan Al-Qur'an menekankan agar manusia menjadikannya sebagai ideal moral.

Artinya:

"Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan". (QS. Al-'A'rāf ayat 29)

Artinya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan." (QS. An-Nahl: 90)

Bahkan, Al-Qur'an menempatkan keadilan lebih dekat kepada takwa.

-

³⁶ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan* Islam..., 33.

يُّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىۤ أَلَّا تَعْدِلُواْ الْعَوْالُونَ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىۤ أَلَّا تَعْدِلُواْ اللَّهَ وَاللَّهَ وَاللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Mā'idah: 8)

Pelaksanaan asas ini dalam akad, dimana para pihak yang melakukan akad dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.

Artinya:

"Dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Baqarah: 177)

Asas ini berkaitan erat dengan asas kesamaan, meskipun keduannya tidak sama, dan merupakan lawan dari kezaliman. Salah satu bentuk kezaliman adalah mencabut hak-hak kemerdekaan orang lain dana tau tidak memenuhi kewajiban terhadap akad yang dibuat.³⁷

e. Asas Kerelaan (Al-Ridha)

٠

³⁷ Mariam Darus Badzrulzaman et al., *Kompilasi Hukum Perikatan...*, 250.

Asas ini menyatakan bahwa semua kontrak yang dilakukan oleh para pihak harus di dasarkan kepada kerelaan semua pihak yang membuatnya. Kerelaan para pihak yang berkontrak adalah jiwa setiap kontrak yang Islami dan dianggap sebagai syarat terwujudnya semua transaksi. Jika dalam suatu kontrak asas ini tidak terpenuhi maka kontrak yang dibuatnya telah dilakukan dengan cara yang batil. Kontrak yang dilakukan itu tidak dapat dikatakan telah mencapai sebuah bentuk usaha yang dilandasi saling rela antara pelakunya jika di dalamnya terdapat unsur tekanan, paksaan, penipuan atau ketidak jujuran dalam pernyataan. Dasar asas ini adalah (QS. An-Nisā: 29)

ء مِّنكُمُ

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu." ³⁸

f. Asas Kejujuran (*Ash-Shidq*)

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalat. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Selain itu, jika terdapat ketidakjujuran dalam perikatan, akan menimbulkan perselisihan di antara para pihak. Dalam (QS. Al-Ahzab:

70)

³⁸ Saiful Jazil, *Figh Muamalah...*, 66.

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar."39

g. Asas Tertulis (*Al-Kitabah*)

Asas ini menyatakan bahwa setiap akad hendaknya dibuat secara tertulis. Hal ini berkaitan dengan keperluan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa. Dalam Al-Qur'an surat (Al-Baqarah: 282-283) mengisyaratkan, agar akad yang dilakukan benar-benar senantiasa berada dalam kebaikan dan perasaan yang nyaman bagi semua pihak. Bahkan dalam pembuatan akad hendaknya juga selalu disertai dengan saksi-saksi yang dapat dipercaya, rahn atau jaminan (untuk kas<mark>us tertentu)</mark>, dan prinsip tanggung jawab individu.

Di dalam Islam, ketika seorang subjek hukum hendak membuat suatu akad dengan subjek hukum lainnya, selain harus didasari dengan adanya kata sepakat, ternyata juga dianjurkan untuk dituangkan kedalam bentuk tertulis dan juga diperlukan kehadiran saksi-saksi, hal demikian sangatlah penting, terutama sekali untuk akad-akad yang membutuhkan pengaturan yang kompleks.40

4. Macam-Macam Akad

Menurut Ulama fiqih, akad dapat dibagi dari beberapa segi, apabila dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', maka akad dibagi dua, yaitu:

³⁹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan* Islam *di Indonesia...*, 37.

⁴⁰ Hasanuddin Rahman Daengnaja, How to Design Sharia Contract, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), 144.

- a. Akad sahih, yaitu akad yang telah memenuhi unsur dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara'. Dalam istilah ulama Hanafiyah, akad sahih adalah akad yang memenuhi ketentuan syariat pada asalnya dan sifatnya.
- b. Akad yang tidak sahih yaitu akad yang terdapat kekurangan pada unsur dan syaratnya. Dengan demikian, akad ini tidak berdampak hukum atau tidak sah. Jumhur ulama selain Hanafiyah menetapkan bahwa akad yang batil atau fasid termasuk golongan ini, sedangkan ulama Hanafiyah membedakan antara fasid dan batal.⁴¹

Suatu akad dinamakan akad batal apabila terjadi pada orang-orang yang tidak memenuhi syarat-syarat kecakapan atau objeknya tidak dapat menerima hukum akad hingga dengan demikian pada akad itu terdapat hal-hal yang menjadikannya dilarang syara'.

Akad batal dipandang tidak pernah teradi menurut hukum, meskipun secara material pernah terjadi, yang oleh karenannya tidak mempunyai akibat hukum sama sekali.⁴²

Adapun akad fasid adalah akad yang dilakukan oleh orang-oranag yang memenuhi syarat kecakapan terhadap objek yang dapat menerima hukum akad, tetapi padannya ada hal-hal yang tidak dibenarkan syara'. Dalam hal ini kedua beleh pihak dapat meminta fasakh.

Menurut fuqaha mazhab Hanafi, pembagian akad tidak sah menjadi akad batal dan rusak itu tidak berlaku untuk segala macam akad, tetapi

.

⁴¹ Rachmat Syafe'I, Fiqh Muamalah..., 66.

⁴² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata* Islam), (Yogyakarta: UII Press, 2000), 114

hanya dalam akad untuk memindahkan hak milik / akad kebendaan yang mengakibatkan kewajiban timbal balik antara pihak-pihak yang berakad. Adapaun akad bukan kebendaan, seperti perwakilan, perwalian dan sebagainya, demikian pula akad kebendaan yang tidak menimbulkan kewajiban timbal balik, seperti pinjam meminjam, titipan dan sebagainya; demikian pula tindakan-tindakan sepihak seperti wakaf, pengakuan dan sebagainya, tidak dibedakan antara yang batal dan yang rusak.⁴³

5. Akhir Akad

Akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa adanya izin dalam akad *mauquf* (ditangguhkan).

Akad dengan pembatalan tekadang dihilangkan dari asalnya, seperti pada masa khiyar, terkadang dikaitkan pada masa yang akan datang, seperti pembatalan sewa-menyewa dan pinjam-meminjam yang telah disepakati selama 5 bulan, tetapi sebelum sampai lima bulan, telah dibatalkan.

Pada akad ghair lazim, yang kedua pihak dapat membatalkan akad, pembatalan ini sangat jelas, seperti pada penitipan barang, perwakilan, dan lain-lain, atau yang ghair lazim pada satu pihak dan lazim pada pihak lainnya, seperti gadai. Orang yang menerima gadai dibolehkan membatalkan akad walaupun tanpa sepengetahuan orang yang menggadaikan barang.

•

⁴³ Ibid.,115-116

Adapun pembatalan pada akad lazim, terjadi ketika akad rusak, adanya khiyar, pembatalan akad, tidak mungkin melaksanakan akad, dan masa akad berakhir.⁴⁴

B. Kemitraan dalam hukum Islam (Shirkah)

1. Pengertian Shirkah

Secara etimologi, s*hirkah* berarti percampuran (*al-ikhtilāṭ*), yaitu percampuran antara salah satu harta dengan harta yang lainnya, sehingga sebagian harta itu sulit dibedakan dari bagian lainnya, kemudian Jumhur (Ulama) menggunakannya untuk akad tertentu walaupun tidak terjadi percampuran dua nishab (yang sama), karena adanya akad itu menyebabkan terjadinya percampuran.

Sedangkan menurut istilah, para fuqaha berbeda pendapat mengenai pengertian shirkah, diantaranya menurut syayid Sabiq, yang dimaksud dengan shirkah ialah akad antara orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan. 45 adalah suatu perkongsian antara dua orang atau lebih baik dalam hal kepemilikan maupun dalam hal usaha Bersama yang bertujuan untuk keuntungan bersama. 46 Menutut Hasbi Ash Shidieqie, bahwa yang dimaksud dengan shirkah ialah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta'awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi

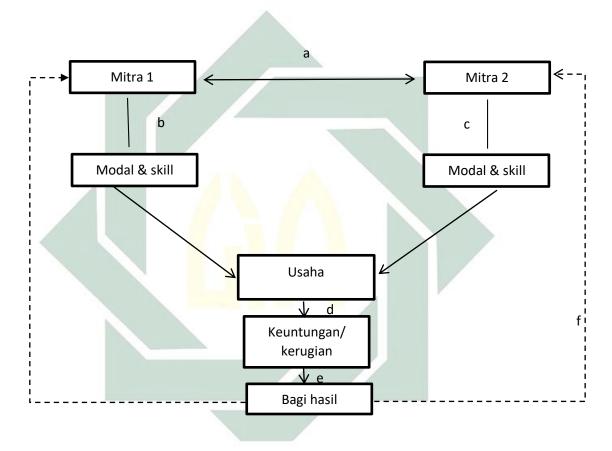
⁴⁴ Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah...*, 70.

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*..., 217

⁴⁶ Saiful Jazil, *Figh Muamalah...*, 138-140.

keuntungannya.⁴⁷ Dari beberapa pengertian diatas, pada intinya pengertian s*hirkah* sama, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yaitu keuntungan dan kerugianya ditanggung bersama.

Berikut ini merupakan bentuk skema akad shirkah.⁴⁸



Keterangan:

- a. Mitra 1 dan mitra 2 melaksanakan kerjasama usaha. Bagi hasil ditetapkan sesuai dengan persentase nisbah yang elah diperjanjikan antara
- b. mitra 1 menyerahkan modal dan skill
- c. mitra 2 menyerahkan modal dan skill

⁴⁸ Ismail , *Perbankan Syariah* (Jakarta : 2011), 80

⁴⁷ Hendi suhendi, *fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 125

- d. menghasilkan keuntungan atau kerugian
- e. hasil usaha proyek tersebut akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan

2. Dasar Hukum Shirkah

a. Al quran

Ayat-ayat yang berkenaan dengan akad shirkah, antara lain:

1) QS. Shād: 24

Artinya:

"Dan sungguh kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain."

Dalam ayat ini ditafsirkan ulama' maksud khulato' adalah orang-orang yang bersekutu. Orang-orang yang bersekutu itu membohongi bagian yang lain ke sebagian yang lainnya kecuali orang yang beriman dan beramal sholih. Ini terjadi pada masa Nabi Dawud As, maka praktik *Shirkah* pada ayat ini adalah termasuk syar'u man qoblana ini juga ditetapkan sampai sekarang

2) QS. al-Nisa ayat 12

Artinya:

"Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu." 49

b. Hadith

Di samping ayat-ayat diatas, dijumpai pula sabda rasulullah SAW dalam sebuah hadits kudsi yang membolehkan akad *Shirkah*:

Artinya:

"Dari Abu Hurairah, ia merafa'kannya kepada Nabi, Beliau bersabda: Sesungguhnya Allah berfirman: Saya adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selagi salah satunya tidak mengkhianati temannya. Apabila ia berkhianat kepada temannya, maka saya akan keluar dari antara keduanya." (HR. Abu Dawud).⁵⁰

3. Macam-Macam Shirkah

Shirkah pertama-tama dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu shirkah amlak dan shirkah 'uqud.

a. Shirkah amlak

Shirkah Amlak adalah pemilikan suatu jenis barang oleh lebih dari satru orang. Shirkah ini terjadi pada harta warisan atau hibah kepada lebih dari satu orang. Harta ini menjadi milik mereka bersama dan diusahhakan bersama.⁵¹

b. Shirkah Uqud

.

⁴⁹ Dewi Masithoh, et al, *Metodologi Ayatul Ahkam: Paradigma Konsep Fiqh dalam Kajian Ayatul Ahkam*, (Kediri: Lirboyo Press, 2016), 225.

⁵⁰ Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat..., 342.

⁵¹ Sayyid Sabiq, Figh Sunnah: jilid 3, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 355

Shirkah al-uqūd yaitu, bahwa dua orang atau lebih melakukan akad untuk bergabung dalam suatu kepentingan harta dan hasilnya berupa keuntungan.⁵². Shirkah al-'uqūd ini terbagi menjadi lima bagian, yaitu 'inān, wujuh, abdān, mufawwaḍah dan mudharabah. Adapun shirkah 'uqūd menurut ulama al-Hanafiyah terbagi kepada tiga bentuk, yaitu shirkah al-mal, shirkah al-abdan, dan shirkah al-wujūh. ketiga bentuk Shirkah tersebut masing-masing terbagi kepada dua bagian, yaitu al-mufawaḍah dan al-'inan, sehingga hasilnya terdapat enam bentuk Shirkah, yaitu shirkah al-mufawaḍah fi al-maal, shirkah al'inān fi al-mal. Shirkah al-mufawaḍah fi al-abdaan, shirkah al-'inan fi al-abdan, Shirkah al-mufawaḍah fi al-wujuh dan shirkah al-'inaan fi al-wujuh.

1) Shirkah 'inan

Shirkah antara dua orang atau beberapa orang mengenai harta, baik mengenai modalnya, pengelolannya ataupun keuntungannya. Pembagian keuntungan tidak harus berdasarkan besarnya partisipasi, tetapi adalah berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian.

2) Shirkah mufawadah

Shirkah antara dua orang atau lebih mengenai harta, baik mengenai modal, pekerjaan ataupun tanggungjawab, maupun mengenai hasil atau keuntungan. Dari imam mazhab berbeda pendapat mengenai hukum dan bentuk shirkah mufawaḍah ini. Imam Malik dan abu hanifah secara garis besar spendapat atas

⁵² Ibid., 356

kebolehannya, meski keduanya masih berselisih pendapat tentang beberapa syarat. Sedangkan Imam Syafi'I berpendapat bahwa shirkah mufawadah ituy tidak boleh.⁵³

3) Shirkah wujuh

Shirkah antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan tingkat professional yang baik mengenai sesuatu pekerjaan/bisnis, dimana mereka membeli barang dengan kredit dan menjualnya secara tunai dengan jaminan reputasi mereka.

4) Shirkah a'māl

Shirkah antara dua orang atau lebih yang seprofesi untuk menerima pekerjaan bersama-sama dan membagi untung bersama berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian.

4. Syarat dan Rukun Shirkah

Dalam suatu kerjasama diperlukan adanya suatu rukun dan syaratsyarat agar menjadi sah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun s*hirkah* yang harus ada dalam melakukan kerjasama antara dua orang atau lebih sebagai berikut:

- a. Para pihak yang melakukan perjanjian *shirkah* (*al-'aqidain*)
- b. Objek akad, yaitu modal, kerja dan keuntungan.
- c. Şighat yaitu, *Ijab* dan *qabul*.⁵⁴

Beberapa syarat pokok s*hirkah* menurut Usmani antara lain:

٠

⁵³ Ibnu Rusdy, *Bidayatul al-Mujtahid*, jilid 4, Alih Bahasa. Imam Ghazali Said, (Jakarta: Pustaka Amani,1995), 306

⁵⁴ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam* Islam, (Jakarta: Sinar Grafika 1994), 76

- a. Syarat akad, hubungan yang dibentuk oleh para mitra melalui kontrak atau akad yang disepakati bersama, harus mempunyai empat syarat yaitu syarat berlakunya akad, syarat sahnya akad, dan syarat yang harus dipenuhi.
- b. Pembagian proporsi keuntungan. Dalam pembagian proporsi keuntungan harus dipenuhi hal-hal berikut:
 - Proporsi keuntungan dibagikan kepada para mitra usaha harus disepakati di awal kontrak atau akad. Jika proporsi belum ditetapkan, akad tidak sah menurut syariah.
 - 2) Rasio atau nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha.
- c. Penentuan proporsi keuntungan. Dalam menentukan proporsi keuntungan terdapat beberapa pendapat dari para ahli hukum Islam sebagai berikut:
 - Imam Malik dan Imam Syafi"i berpendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan.
 - 2) Imam Ahmad berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat pula berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan.
 - Imam Abu Hanafiah, berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal pada kondisi normal. Namun demikian,

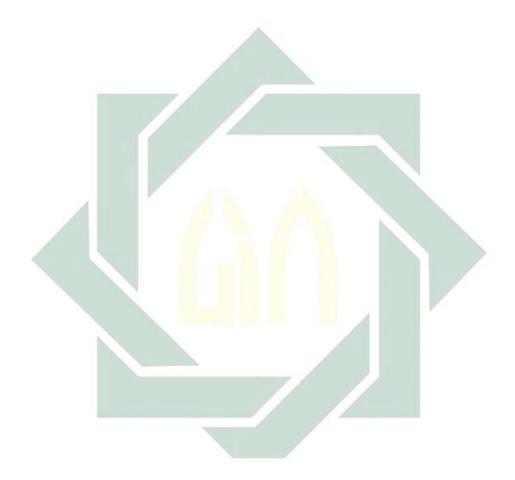
mitra yang memutuskan menjadi sleeping partner, proporsi keuntungannya tidak boleh melebihi proporsi modalnya.

- d. Pembagian kerugian. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa setiap mitra memegang kerugian sesuai dengan porsi investasinya. Oleh karena itu, jika seorang mitra menyertakan 40% modal maka dia harus menanggung 40% kerugian, tidak lebih, tidak kurang. Apabila tidak demikian, akad Syirkah tidak sah.
- e. Sifat modal. Ahli hukum Islam berpendapat bahwa modal yang diinvestasikan oleh setiap mitra usaha dalam bentuk modal likuid. Hal ini berarti bahwa akad syirkah hanya dapat dengan uang dan tidak dapat dengan komoditas. Dengan kata lain, bagian modal dari suatu perusahaan harus dalam bentuk moneter (Uang).
- f. Manajemen s*hirkah*. Prinsip normal dari syirkah bahwa setiap mitra mempunyai hak untuk ikut serta dalam manajemen dan bekerja untuk usaha.⁵⁵
- 5. Sebab-sebab yang membatalkan s*hirkah*
 - 1) Pembatalan oleh salah seorang anggota serikat. Hal tersebut dikarenakan akad *shirkah* merupakan akad yang jāiz dan ghair lāzim, sehingga memungkinkan untuk di fasakh
 - 2) Meninggalnya salah seorang anggota serikat
 - 3) Murtadnya salah seorang anggota serikat

.

⁵⁵ Ascarya, Akad dan prooduk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 53

4) Gilanya peserta yang terus-menerus, karena gila menghilangkan status wakil dari wakālah, sedangkan *shirkah* mengandung unsur wakālah.⁵⁶



⁵⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat..*, 363-364.

BAB III

SISTEM KEMITRAN USAHA TERNAK AYAM BROILER DI DESA SIMBATAN KECAMATAN SARIREJO KABUPATEN LAMONGA

A. Gambaran umum desa simbatan

1. Kondisi Geografis Desa

Secara administratif, Desa Simbatan terletak di Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan dengan luas desa + 524 Ha. Secara umum Desa Simbatan mayoritas penduduknya merupakan penduduk merupakan penduduk asli dan sisanya adalah pendatang. Posisi dibatasai oleh wilayah desa-desa tetangga yaitu: 57

- a. Di Sebelah utara berbatasan dengan Desa Deket Wetan.
- b. Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tambakrigadung.
- c. Di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sumberjo, dan
- d. di sebelah timur berbatasan dengan Desa Canggah.

Jarak tempuh Desa Simbatan ke Kecamatan adalah 12 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 40 menit. Sedangkan jarak tempuh ke Kabupaten adalah 5 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit. Berikut kondisi geografis Desa Simbatan secara umum berdasarkan data profil desa tahun 2018.

2. Luas Wilayah

.

⁵⁷ www.lamongankab.go.id diakses pada 8 November 2018

Luas wilayah desa simbatan kecamtan sarirejo kabupaten lamongan keseluruhanya adalah 524 ha. Jumlah luas wilayah tersebut bila diperinci menurut pengunaan tanahnya dapat dibedakan sebagai berikut :⁵⁸

Pemukiman umum : 25 Ha

Perkantoran : 0,5 Ha

Sawah irigasi : 26 Ha

Ladang atau tegalan : 61 Ha

Sawah irigasi : 80 Ha

3. Kependudukan

Penduduk desa simbatan kecamatan sarirejo kabupaten lamongan terdiri dari 626 kepala keluarga dengan jumlah penduduk sebanyak 2439 orang yang terdiri dari laki – laki: 1199 orang dan perempuan: 1240 orang. Menurut Data Administrasi Desa Simbatan, bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun sekitar 1301 orang atau sekitar 52% dari 2439 jiwa jumlah penduduk desa Simbatan. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM di desa tersebut, shanya jika kapasitas SDM didukung dengan kualitas dan potensi yang ada di desa tersebut.

.

⁵⁸ Ibid.

Pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi juga menjadi factor pendukung dari tingkat produktifitas penduduk, jumlah peningkatan penduduk yang pada tahun 2017 terdapat 2395 jiwa meningkat 44 jiwa pada 2018. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah Akseptor Keluarga Berencana yang masih relatif sedikit dari jumlah penduduk yang ada.

Tingkat kemiskinan di desa Simbatan termasuk tinggi. Dari jumlah 626 KK di atas, sejumlah 39 KK tercatat sebagai Pra Sejahtera, 136 KK Keluarga Sejahtera I, 117 KK Keluarga Sejahtera II, 254 KK Keluarga Sejahtera III dan 79 adalah Keluarga sejahtera III Plus. Jika KK golongan Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I adalah miskin, maka terdapat 175 KK yang tergolong keluarga miskin di desa Simbatan.⁵⁹

Table 3.1

Mata pencaharian masyarakat Desa Simbatan

Jenis Mata Pencaharian (pekerjaan)	Jumlah Penduduk
Petani sawah	500
Peternak (ayam broiler)	15
Petani tambak	150
Pegawai pemerintah	43
Pedagang	140
Buruh perusahaan	225
Jasa	175
Lain – lain	122
Total	1.550

Sumber: RPJM Desa Simbatan Tahun 2014 – 2017

_

⁵⁹ Data Monografi Desa Simbatan, 2018

Dari data diatas dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk Desa Simbatan bermata pencaharian sebagai petani baik itu sebagai petani sawah yang berjumlah 500 orang, petani tambak berjumlah 150. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini ada beberapa warga yang beralih menjadi peternak ayam broiler.

4. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan.

Dari data di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk desa Simbatan mampu menyelesaikan sekolah sampai jenjang pendidikan wajib belajar dua belas tahun (SD s/d SMA), bahkan sampai perguruan tinggi. Hal ini dipengaruhi kesediaan SDM yang memadahi dan mumpuni, serta factor kesediaan Sumber Daya Alam (SDA) yang bisa dijadikan pendukung kualitas ekonomi masyarakat untuk menuntut pendidikan yang lebih baik,

Meskipun demikian, terdapat 96 jumlah penduduk usia produktif yang masih belum bekerja. Hal ini disebabkan factor ekonomi keluarga yang belum mencukupi dalam hal pembiayaan pendidikan. Sebenarnya ada solusi yang menjadi alternatif bagi persoalan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di desa Simbatan yaitu melalui pelatihan dan kursus. Namun sarana atau lembaga ini ternyata juga belum tersedia dengan baik di desa Simbatan. Bahkan beberapa lembaga bimbingan belajar dan pelatihan yang pernah ada tidak bisa berkembang.⁶⁰

5. Kesehatan Masyarakat

Masalah pelayanan kesehatan masyarakat adalah hak setiap warga masyarakat dan merupakan hal yang penting bagi peningkatan kualitas masyarakat ke depan. Masyarakat produktif harus didukung oleh kondisi kesehatan.Salah satu cara untuk mengukur masyarakat dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang terserang penyakit. Kondisi yang ada menunjukkan bahwa gangguan kesehatan yang sering dialami penduduk adalah penyakit yang bersifat cukup berat dan lama untuk sembuh, yang diantaranya disebabkan perubahan cuaca serta kondisi lingkungan yang kurang sehat, ini tentu mengurangi daya produktivitas masyarakat desa Simbatan secara umum.⁶¹

6. Kehidupan masyarakat Desa Simbatan

a. Kondisi sosial ekonomi

Kondisi social masyarakat Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan, masyarakat mempunyai rasa persaudaraan

⁶⁰ Ibid

⁶¹ www.lamongankab.go.id diakses pada 8 November 2018

yang kuat antara satu dengan yang lainya. Hal itu telihat dari ehidupan sehari-hari yang selalu hidup gotong-royong dan tolong-menolong terhadap masyarakat yang membutuhkan. Adat istiadat yang berlaku di masyarakat juga berjalan dengan baik. Sedangkan dari segi ekonomi kehidupan masyarakat Desa simbatan juga cukup baik, mereka lebih banyak mendapatkan penghasilan dengan bekerja di sektor pertanian baik itu persawahan, ladang atau tambak.⁶²

b. Kondisi keagamaan

Mayoritas penduduk Desa Simbatan beragama Islam dan memiliki tempat peribadatan yaitu 10 musholla atau langgar dan 2 masjid. Dengan adanya tempat peribadatan tersebut maka menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat Desa Simbatan cukup agamis.⁶³

B. Profil peternak

Peternak ayam broiler di Desa Simbatan berjumlah 15 orang peternak mandiri maupun yang bermitra tetapi yang baru melakukan kemitraan baru 3 orang yaitu bapak fahmi, bapak rofiq dan ibu siti. Peternak ayam broiler yg pertama bernama Bapak rofiq beliau merupakan warga asli lamongan. Tempat tinggalnya di Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten lamongan beliau awalnya adalah seorang pegawai di salah satu perusahaan di Surabaya. Namun pada 2016 beliau memutuskan resign dari pekerjaannya dan ingin membuat

.

63 ibid

⁶² ibid

suatu usaha untuk membantu ekonomi keluarganya. Usaha ini diharapkan dapat menambah penghasilan diluar pekerjaan utamanya. Setelah itu pak rofiq memilih untuk memulai usaha ternak ayam broiler.⁶⁴

Sedangkan pak fahmi sudah memulai usaha ternak ayam broilernya sejak 5 tahun yang lalu tepatnya pada 2014 tetapi masih beternak secara mandiri, pak fahmi menyatakan memilih usaha ternak ayam broiler karena dinilai sangat menguntungkan karena usia panen ayam potong yang sangat cepat sekitar 40 hari. Selain itu besarnya kebutuhan akan ayam potong membuat harga ayam cenderung stabil dipasaran. Sama halnya dengan bapak fahmi, Ibu Siti menyatakan beliau sudah memulai usaha sejak 5 tahun yang lalu secara mandiri dimulai dari kandang berukuran 12,5 x 5 meter berisi 500 ekor sampai beliau memiliki 2 kandang berukuran 16 x 5 meter berisi 1000 ekor per kandang.

C. Profil PT Semesta Mitra Sejahtera

PT. Semesta Mitra sejahtera Salah Satu perusahaan dibawah naungan PT Charoen pokphand Indonesia Tbk didirikan pada tahun 1972 di Ancol, Jakarta Utara, sebagai perusahaan *Joint Venture* (JV) yang bergerak dalam bidang agrobisnis dengan kegiatan usaha utama dalam bidang produksi pakan unggas dan pembibitan unggas untuk dipasarkan ke pasar domestik. CPI berafiliasi dengan Charoen Pokphand Group (CPG) yang berbasis di Thailand. Melalui CPG, CPI mendapatkan lisensi produksi pakan ternak yang

⁶⁴ Bapak Rofiq (peternak), Wawancara, Lamongan, 09 November 2018

66 Ibu Siti (peternak), Wawancara, Lamongan, 09 November 2018

⁶⁵ Bapak Fahmi (peternak), Wawancara, Lamongan, 09 November 2018

berkualitas dimana pakan unggas memiliki Feed Conversion Ratio (FCR), rasio pengukur efesiensi pakan terhadap pertumbuhan seekor ayam sebesar 1,63 kali. Sebagai akibat dari peningkatan konsumsi dan pertambahan jumlah penduduk Indonesia yang demikian pesat, maka kebutuhan pakan ternak pun juga meningkat. Menanggapi perkembangan tersebut, PT. Charoen Pokphand Indonesia memperluas usaha dan juga pasarnya dengan mendirikan pabrik baru.⁶⁷

Seiring berjalannya PT. Semesta Mitra Sejahtera pada tahun 1997 pada saat itu terjadi krisis moneter yang mengakibatkan terjadinya inflasi, pada tahun yang sama munculnya bisnis kemitraan yang berupaya untuk dapat membantu peternak agar dapat maju berkembang dengan pola kemitraan Inti Plasma dengan meningkatkan populasi ayam broiler yang pada saat itu penjualan pakan produksi melimpah dalam kemitraan sehingga meningkatkan pendapatan peternak.

PT. Semesta Mitra Sejahtera sebagai salah satu dari perusahaan penyedia protein hewani bagi kebutuhan masyarakat terbesar dengan mengedepankan komitmen untuk menghasilkan produk terbaik dan terpercaya dengan mengedepankan kualitas produk yang unggul dengan diolah secara higenis, sehat dan halal.⁶⁸

-

68 Ibid

⁶⁷ Bapak sentot, Wawancara, Lamongan, 09 November 2018

D. Latar belakang kemitraan usaha ternak ayam broiler

Pola kemitraan merupakan suatu bentuk kerja sama yang dilakukan antara perusahaan dengan peternak dari segi pengelolaan usaha peternakan berdasarkan asas saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. PT. Semesta Mulia Sejahtera (SMS) salah satunya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang commercial farm dalam kemitraan ayam broiler.

Bentuk pola kemitraan yang dilakukan oleh PT. SMS merupakan kemitraan Inti Plasma dimana perusahaan sebagai Inti dan peternak sebagai Plasma. Perusahaan dalam kemitraan ini menyediakan DOC, Pakan, obatobatan dan vaksin dan memberikan bimbingan teknis sedangkan peternak menyediakan lahan, kandang, tenaga kerja dan peralatan kandang lainnya yang di butuhkan.⁶⁹

Bagi bapak Edi.⁷⁰ Mengatakan bahwa peternak yang memiliki keterbatasan modal akan sangat bergantung pada perusahaan karena perusahaan akan menjamin sistem pemasaran penjualan ayam, serta sangat terbantu oleh perusahaan dari segi permodalan. Sedangan menurut Bapak Hadist bahwa dalam kerjasama ini

Menurut Bapak Rofiq.⁷¹Mengatakan bahwa ia melakukan kemitraan usaha ternak ayam broiler tersebut dikarenakan ia memiliki lahan dan kandang ayam namun tidak mempunyai modal untuk memasok sapronak. Karena harga

-

⁶⁹ Hardi (petugas pengawas lapangan), Wawancara, Lamongan, 08 November 2018

⁷⁰ Bapak Edi (pengawas lapangan), Wawancara, Lamongan, 08 November 2018

⁷¹ Bapak Rofiq (peternak), Wawancara, Lamongan, 09 November 2018

kebutuhan sapronak sangat banyak dan mengurangi resiko kerugian yang besar, maka ia pun melakukan kemitraan dengan PT. SMS. Sedangkan menurut Bapak Fahmi, 72 bahwa melakukan kemitraan ini, ia merasa lebih dimudahkan dalam hal pemasaran ayam hasil budidaya, karena perusahaan menjamin pemasaran ayam dengan membeli hasil panen ayam dari peternak Tetapi terkadang saat harga ayam dipasaran naik harga ayam yang dibeli perusahan tidak ikut naik, padahal dalam kontrak perjanjian tertulis bahwa perusahan harus mempertimbangkan harga dipasaran. Hal ini menyebabkan keuntungan yang diterima peternak berkurang.

Adapun menurut ibu Siti,⁷³ menambahkan ingin memulai usaha ternak ayam broiler namun memiliki keterbatasan modal dan juga untuk meningkatkan kebutuhan ekonomi keluarganya. Ia memilih usaha ternak ayam broiler karena dinilai sangat menguntungkan karena usia panen ayam potong yang sangat cepat sekitar 35 – 37 hari. Tetapi kerjasama antara peternak dan perusahaan terkadang mengalami kerugian ketika ayam yang diternak tibatiba banyak yang mati karena terkena penyakit.

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa terjadinya kemitraan usaha ternak ayam broiler dilatar belakangi oleh beberapa hal yaitu:

 Peternak miliki lahan dan kandang ayam tetapi kekurangan modal untuk membeli sapronak dan mengurangi resiko kerugian.

⁷² Bapak Fahmi (peternak), Wawancara, Lamongan, 09 November 2018

⁷³ Ibu Siti (peternak), Wawancara, Lamongan, 09 november 2018

- Peternak merasa terbantu oleh perusahan dalam hal pemasaran hasil ternak ayam.
- 3. Kerjasama ini berdasarkan asas saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan kedua belah pihak.

Kendala yang dihadapi dalam usaha ternak ayam potong ini antara lain:

- 1. Penyakit yang diakibatkan lingkungan kotor.
- 2. Cuaca yang tidak menentu menimbulkan kematian mendadak padaayam.
- 3. Suara bising menimbulkan ayam stres dan kematian.
- 4. Aroma ayam yang mengganggu lingkungan.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut diatas, yaitu:

- a. Membersihkan kand<mark>ang, membersihk</mark>an tempat pakan dan tempat minum, serta memberikan vaksinasi.
- Membuat kandang dalam suhu normal dalam berbagai perubahan cuaca dengan bantuan lampu listik dan penutup kandang yang kedap air.
- 3. Meletakkan kandang dari pemukiman masyarakat.
- 4. Membersihkan kandang serta memberikan obat khusus untuk menghilangkan aroma kotoran ayam.⁷⁴

E. Akad dalam Kemitraan

1. Isi perjanjian dalam kemitraan usaha ternak ayam broiler

٠

⁷⁴ Bapak Rofiq, Wawancara, Lamongan, 9 November 2018

Ketika suatu kemitraan telah berjalan maka akan menimbulkan suatu perjanjian, ketika perjanjian sudah dilaksanakan maka akan menimbulkan tanggung jawab bagi masing-masing pihak yang bermitra. Tanggung jawab para pihak dalam kerja sama kemitraan inti plasma sebagaimana disepakati perjanjian ini secara tertulis. Adapun tanggung jawab dari masing- masing pihak yang bermitra:

- a. Tanggung jawab pihak pertama (PT. SMS)
 - 1) memberikan knowhow berupa bimbingan teknis pemeliharaan atau budidaya ayam ras pedaging (ayam) bimbingan manajemen dan administrasi usaha dan bantuan pemasaran hasil budidaya/ peternakan, bantuan manajemen keuangan, antara lain dengan cara menugaskan seorang petugas Technical Service (TS) untuk sewaktu-waktu mengajar dan membimbing pekerja petrernakan peternak
 - 2) Menyediakan atau memasok, kepada pihak kedua, sarana produksi peternakan, yang meliputi pakan, anak ayam umur sehari (Day Old Chicks/DOC) vaksin dan obat-obatan (selanjutnya disebut sapronak) yang jenis, jumlah, jadwal dan syarat-syarat pemasokannya akan ditentukan dari waktu ke waktu oleh pihak pertama.
 - membantu mengelola pengunaan sapronak termasuk apabila perlu memediasi pengalihan sapronak yang tidak digunakan kepada pihak

- lain baik melalui mekanisme jual beli, tukar menukar, ataupun dengan cara lainya.
- 4) membeli ayam hasil produksi/budidaya pihak kedua menurut syaratsyarat dan ketentuan – ketentuan yang akan disepakati dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian.
- 5) membantu pihak kedua dalam administrasi keuangan dan pengelolaan hutang piutang pihak pertama
- b. Tanggung jawab pihak kedua (peternak)
 - 1) Dengan biaya sendiri menyediakan lahan peternakan
 - 2) Membangun kandang ayam dan menyediakan perlengkapan/
 peralatannya sesuai standar yang ditetapkan oleh pihak pertama.
 - 3) menyediakan sendiri tenaga kerja
 - 4) melaksanakan budidaya atau pemeliharaan ayam menurut petunjuk—
 petunjuk dan tatacara budidaya/pemeliharaan ayam yang ditetapkan
 oleh pihak pertama.
 - 5) menjaga mutu/kualitas ayam, antara lain dengan cara mengunakan sapronak yang dipasok atau yang direkomendasikan oleh pihak pertama menurut tatacara serta jumlah yang ditetapkan oleh pihak pertama.
 - 6) menjalankan prosedur administrasi dan tatacara panen yang ditetapkan.
 - 7) menjaga keamanan kandan dan sapronak.

- 8) menjalankan *biosecurity* (sistem pengamanan hayati) yang ketat, termasuk dengan cara tidak mencampur ayam dengan ayam dari luar kandang dan tidak memasukan pakan yang tidak direkomendasikan ke kandang.
- 9) tidak menambah ayam di kandang sehingga melebihi kapasitas yang diperbolehkan
- 10) tidak mengunakan yang tidak direkomendasikan
- 11) melapor secara periodic perkembangan ayam broiler
- 12) menjual ayam hasil budi daya kepada pihak pertama menurut syaratsyarat
- 13) dalam tempo kurang dari 12 jam segera melapor kepada pihak pertama apabila terjadi berjangkitnya penyakit unggas.
- 14) mematuhi peraturan perundang undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada kewajiban perizinan dan peraturan perundang undangan di bidang perpajakan.⁷⁵

c. Pengadaan sapronak

- Pemasokan sapronak oleh pihak pertama kepada pihak kedua dilakukan melalui mekanisme jual beli secara kredit, dengan pihak pertama berlaku sebagai penjual dan pihak kedua sebabagai pembeli
- 2) Pihak pertama dengan ini setuju untuk dari waktu ke waktu selama jangka waktu kemitraan menurut pejanjian ini memasok sapronak kepada pihak kedua

⁷⁵ Ibid.

d. Pemasaran ayam

- Guna menjamin pemasaran ayam hasil budidaya pihak kedua, pihak pertama selaku inti akan membeli ayam hasil budidaya pihak kedua berdasarkan perjanjian ini.
- 2) Para pihak dengan ini sepakat untuk menyepakati harga ayam dari waktu kewaktu dengan mempertimbangkan perhitungan biaya dan perkembangan harga pasar⁷⁶

2. Bentuk perjanjian kemitraan

Perjanjian atau akad kemitraan usaha ternak ayam broiler di Desa Simabatan kecamatan sarirejo Kabupaten Lamongan, peternak dan perusahaan telah melakukan kesepakatan untuk melakukan kemitraan ini dilakukan secara tertulis. Bentuk pola kemitraan yang dilakukan merupakan kemitraan inti plasma dimana perusahaan sebagai inti dan peternak sebagai plasma.

F. Realisasi Akad

1. Praktik kemitraan usaha ternak ayam broiler

Praktik kemitraan usaha ternak ayam broiler yang terjadi di Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan antara pihak pertama dengan pihak kedua menurut bapak rofiq diawali dengan pemberian pinjaman modal berupa Sapronak dari PT.SMS yang akan dikelola oleh peternak menjadi ayam broiler siap untuk dipanen. Sesuai dengan

⁷⁶ Bapak Adi (pegawai lapangan), wawancara, Lamongan, 08 November 2018

kesepakatan, ayam ini dipelihara oleh peternak menurut petunjuk dan tatacara pemeliharaan ayam yang ditetapkan oleh pihak pertama sampai masang panen tiba adalah tanggungjawab peternak.⁷⁷

Akan tetapi, PT.SMS tidak lepas begitu saja dalam kemitraan ini, PT.SMS tidak menjadi pemodal murni tapi juga mempunyai peran dan tugas dalam kerjasama ini. PT.SMS juga mempunyai peran dan tugas memberi bimbingan teknis pemeliharaan, manajemen, administrasi dan bantuan pemasaran hasil panen. Selain itu, PT.SMS juga membantu mengelola penggunaan Sapronak agar sesuai petunjuk dan tatacara pemeliaraan ayam.⁷⁸

Ketika tiba masa panen ayam Akan dibeli oleh pihak perusahaan sesuai dengan perjanjian. Masa panen ayam biasanya diantara 35-37 hari tergantung kondisi ayam. Ayam yang bisa dijual adalah ayam dengan berat badan 1,4-2 kg. Semakin lama masa panen ayam bisa mempengaruhi pendapatan ketika penjualan hasil panen. Tetapi peternak ayam biasanya memilih waktu yang lebih singkat untuk menghemat biaya lain-lain dari pemeliharaan ayam.

Adapun contoh kasus kemitraan usaha ternak ayam broiler antara peternak dengan perusahaan yang terjadi di Desa Simbatan yang dilakukan oleh Bapak fahmi (Peternak) dan PT. Semesta Mitra Sejahtera (SMS).

Bapak Fahmi memiliki 3 kandang dengan luas 16 m x 5 m. Selama masa pemeliharaan ayam pak fahmi bertanggungjawab dengan pemberian

78 Ibid

⁷⁷ Bapak rofiq (peternak), Wawancara, Lamongan, 09 Novemeber 2018

pakan, minum dan kebersihan kandang. Biaya yang ditanggung pak Fahmi selama masa pemeliharaan ayam adalah menyediakan perlengkapan kandang, tenaga kerja, dan penggunaan listrik. Masih menurut pernyataan pak Fahmi, pada awal kerjasama diterima anakan ayam sebanyak 3000 ekor dan 20 kwintal pakan ayam, pakan tersebut akan di berikan secara bertahap setiap pekan sesuai dengan kebutuhan.⁷⁹

Table 3.2 Modal Perusahaan

Banyak	Nama modal	Harga	Jumlah
3000	Bibit ayam	Rp 6.500	Rp 19.500,000
168	Pakan	Rp 300.000	Rp 50.400,000
10	Obat-obatan	Rp 80.000	Rp 800.000
12	Vit <mark>am</mark> in	Rp 80.000	Rp 960.000
		Total	Rp 71.660.000

Table 3.3

Modal Peternak

Banyak	Nama modal	Harga	Jumlah
2	Kandang	Rp. 35.000.000	Rp. 70.000.00
7	Terpal	Rp. 150.000	Rp. 1.050.000
8	Lpg	Rp 125.000	Rp 1.000.000
30	Tempat makan ayam	Rp 8.000	Rp 240.000
2	Tenaga operasional	Rp 1.000.000	Rp 2.000.000
35 hari	Listrik	Rp 300.000	Rp 300.000
30	Tempat minum ayam	Rp 11.000	Rp 330.000
8	Lampu	Rp 10.000	Rp 80.000
		Total	Rp. 75.000.000

Kemudian pak Fahmi memelihara selama 37 hari, berikut perhitungan sebagaimana yang dipaparkan diatas:

-

⁷⁹ Ibid.

Table 3.4
Pendapatan Hasil Panen Mandiri

Banyak	Nama modal	Harga	Jumlah	Hasil panen
3000	Bibit ayam	Rp 6.500	Rp 19.500,000	2700 ekor x 1,7
168	Pakan	Rp 300.000	Rp 50.400,000	$kg \times 20.600 =$
10	Obat-obatan	Rp 80.000	Rp 800.000	Rp. 94.554.000
12	Vitamin	Rp 80.000	Rp 960.000	
8	Lpg	Rp 125.000	Rp 1,000.000	Hagil nanan
	Tempat	/		Hasil panen – modal =
30	makan ayam	Rp 8.000	Rp 240.000	Rp. 75.610.000 –
	Tenaga	Rp		Rp. 94.554.000 =
2	operasional	1.000.000	Rp 2.000.000	Rp. 18.944.000
35 hari	Listrik	Rp 300.000	Rp 300.000	149. 10.5 11.000
	Tempat			
30	minum ayam	Rp 11.000	Rp 330.000	
8	Lampu	Rp 10.000	Rp 80.000	
	Total		Rp 75.610.000	

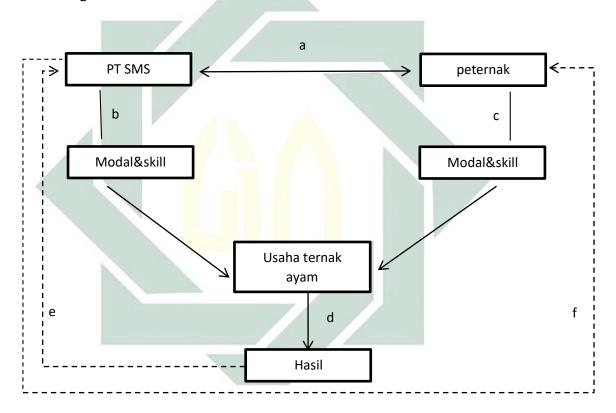
Table 3.5
Pendapatan Hasil Panen Kemitraan

Banyak	Nama modal	Harga	Jumlah	Hasil panen
3000	Bibit ayam	Rp 6.500	Rp 19.500,000	2700 ekor x 1,7
168	Pakan	Rp 300.000	Rp 50.400,000	$kg \times 17.600 =$
10	Obat-obatan	Rp 80.000	Rp 800.000	Rp. 80.784.000
12	Vitamin	Rp 80.000	Rp 960.000	TT
8	Lpg	Rp 125.000	Rp 1,000.000	Hasil panen – modal =
30	Tempat makan ayam	Rp 8.000	Rp 240.000	Rp. 75.610.000 -
2	Tenaga	Rp	•	Rp. 80.784.000 = Rp 5.174.000
	operasional	1.000.000	Rp 2.000.000	
35 hari	Listrik	Rp 300.000	Rp 300.000	
	Tempat			
30	minum ayam	Rp 11.000	Rp 330.000	
8	Lampu	Rp 10.000	Rp 80.000	
	Total		Rp 75.610.000	

Diatas dapat dilihat perbandingan antara usaha ternak ayam yang mandiri dan melakukan kemitraan dengan perusahaan terlihat perbedaan keuntungan yang diperoleh.

2. Alur kemitraan

Dari keterangan pak fahmi dapat dibuat alur kemitraan oleh penulis sebagai berikut ini.⁸⁰



Gambar 3.1 skema alur kemitraan usaha ternak ayam broiler antara PT SMS dengan bapak rofiq.

Penjelasan skema:

a. Terjadi sebuah akad atau transaksi perjanjian anatara PT. SMS dengan bapak rofiq yaitu kemitraan usaha ternak ayam broiler

-

⁸⁰ Ibid.

- b. PT SMS memberikan modal berupa sapronak dan bimbingan
- c. Pak rofiq memberikan kontribusi modal kandang, peralatan ternak dan skill
- d. Hasil dari panen ayam broiler akan di ketahui saat panen selesai
- e. Hasil panen akan dijual ke perusahaan sebagai pengembalian pinjaman modal
- f. Perusahaan membayar hasil panen kepada peternak setelah dikurangi modal yang di berikan kepadanya

Kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan dengan peternak berdasarkan sistem kontrak namun ada kelemahan dalam sistem kontrak yaitu keuntungan peternak sangat kecil karena memperhitungkan harga sapronak (sarana produksi ternak), dan apabila harga di atas kontrak maka harga ayam memperhitungkan laba rugi dengan tetap menggunakan harga kontrak yang sudah disepakati Dalam kerjasama tidak selamanya mengalami keuntungan dan kerugian.

Setelah melakukan usaha ternak ayam broiler selama 37 hari. Paparan pak fahmi menjelaskan bahwa pemeliharaan ayam broiler memiliki resiko kematian antara 5 – 10% sehingga dari 3000 ekor ayam diprediksi ayam mati terbanyak adalah 300 ekor. Sehingga panen ayam dikisaran 2700 ekor setiap pemeliharaan. Ketika diambil harga ayam berdasarkan kontrak perikatan yaitu Rp. 17.600/kg ayam hidup. Hasil panen ditaksir sebanyak 2700 ekor dengan berat rata – rata ayam 1,7 kg. maka hasil penjualan ayam sebanyak 2700 ekor adalah 2700 X 1,7 kg X 17.600 = Rp. 5.784.000

Jika dibuat neraca perdagangan dari ulasan diatas adalah sebagai berikut:

Table 3.6

Neraca perdagangan mengalami keuntungan

no	Rincian	Pengeluaran	pemasukan
1	Modal pihak I	Rp. 71.000.000	-
2	Modal pihak II	Rp. 4.000.000	-
3	Penjualan panen ayam		2700 ekor x 1,7 kgx Rp. 17.600 =Rp. 80.784.000
4	Hasil bersih	Rp. 75.000.000 – R Rp. 5.784.000	kp 80.784,000 =

Jadi, Setelah hasil panen dijual kepada perusahaan sesuai kontrak dan dipotong modal yang dikeluarkan perusahaan. Keuntungan yang diperoleh peternak yaitu Rp. 5.784.000. setelah itu perusahaan akan menjual hasil panen tersebut ke pasar.

3. Resiko kemitraan

Perusahaan dapat mengalami kerugian apabila:

a. Harga ayam di bawah harga pasar maka harga yang ditetapkan tetap harga kontrak dan pihak perusahaan tidak bisa menurunkan harga garansi jika sudah terikat perjanjian

- b. Pihak peternak menjual ayam kepihak lain tanpa sepengetauan pihak perusahaan.
- c. Ayam sakit menyebabkan harga jual ayam jatuh dibawah harga kontrak.⁸¹

Pihak peternak juga dapat mengalami kerugian apabila:

- a. Performance ayam buruk menyebabkan pertumbuhan ayam tidak optimal (ayam afkir).
- b. Kematian ayam yang lebih besar.
- c. Pemanenan dilakukan lebih cepet atau lambat karena permintaan pasar.⁸²

Table 3.7
Neraca perdagangan ketika mengalami kerugian

No	Rin <mark>cian</mark>	Pe <mark>ng</mark> eluaran	Pemasukan
1	Modal Pihak I	Rp. 71.000.000	-
2	Modal pihak II	Rp. 4.000.000	-
3	Penjulan panen ayam	1/1	2000 ekor x 1,7
			kg x Rp. 17.600
			= Rp. 59.840.000
	Hasil bersih	Rp. 75.000.000- Rp. 59.840.000 =	
		Rp15.160.000	

Pada table diatas kedua belah pihak akan mengalami kerugian apabila mengalami kematian ayam yang besar. Hal ini pernah dialami pak rofiq dimana 3000 ayam broiler yang diternak ada sekitar 1000 ayam yang

⁸¹ Bapak Dayat (petugas lapangan), Wawancara, Lamongan, 8 november 2018

⁸² Bapak Rofiq (peternak), Wawancara, Lamongan, 9 november 2018

mengalami kematian karena penyakit. Apabila kematian ayam karena terkena wabah penyakit perusahaan akan menanggung sapronak yang dikeluarkan. Dan peternak akan menanggung sendiri modal yang dikeluarkannya.

4. Tantangan dan peluang dalam kemitraan

Pemeliharaan ayam harus diperhatikan juga kondisi ayam dengan tidak mengisi ayam terlalu padat pada setiap kandangnya karena bila terlalu padat akan berpengaruh pada meningkatnya FCR (Feed Cost Ratio) perbandingan antara jumlah pakan yang dihabiskan dengan kenaikan berat badan dalam periode dan satuan yang sama, semakin kecil angka FCR akan semakin baik pemeliharaan ayam tersebut dan dapat meningkatkan ayam stress apabila kandang terlalu padat. Selain itu, terjadinya kegagalan ayam terjadi karena gangguan pernapasan, nafsu makan menurun, FCR meningkat, terserang penyakit, dan gangguan pertumbuhan. Perusahaan akan membagi strandarisasi kelayakan ayam dalam 3 grade yaitu platinum kualitas terbaik, Gold menengah, dan Silver kualitas di bawah strandar.

Berikut merupakan rumus perhitungan FCR pada usaha ternak ayam broiler yang dilakukan PT SMS:

$$FCR = \frac{Pakan (kg)}{Bobot ayam (kg)}$$

Peternak yang bergabung dalam kemitraan mendapatkan keuntungan dari terjaminnya pasokan sapronak, kepastian pasar, serta pendapatan. Pasokan sapronak tergantung banyaknya yang dibutuhkan dalam pemeliharaan ayam selama periode berlangsung. Adapun kepastian pasar ditentukan oleh Pihak perusahaan dalam memasarkan hasil produksinya.

Pendapatan peternak dihitung dalam analisis perhitungan kebutuhan, biaya, modal dan pendapatan yang diperoleh dari biaya produksi selama proses pemeliharaan ayam. Dalam pembagian bagi hasil pihak perusahaan dan plasma sepakat melakukan perhitungan pada setiap akhir siklus dengan perhitungan atas seluruh biaya yang timbul dalam pemeliharaan ayam. Pendapatan peternak pun tergantung kepada baik buruknya pemeliharaan pada ternak ayam.⁸³

_

⁸³ Bapak Rofiq (Peternak), Wawancara..., 8 november 2018

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KEMITRAAN USAHA TERNAK AYAM BROILER DI DESA SIMBATAN KECAMATAN SARIREJO KABUPATEN LAMONGAN

A. Analisis Akad Kemitraan Usaha Ternak Ayam Broiler Di Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan

Kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Remitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan di antara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis. Melalui kemitraan antara perusahaan dengan peternak kecil dapat meningkatkan produktifitas, meningkatkan pasar, meningkatkan keuntungan, sama-sama menanggung resiko, menjamin pasokan bahan baku, menjamin distibusi pemasaran. Kemitraan juga meningkatkan kesempatan berkiprahnya pengusaha kecil dalam perekonomian nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mengurangi kesenjangan sosial.

Jika dilihat dari uraian diatas, maka sudah selayaknya membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam hal bermu'āmalah. Salah

65

⁸⁶ Muhammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha*, (Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999) hal. 43

satu cara yang dapat dilakukan yakni dengan melakukan kemitraan yang bertujuan untuk meringankan kedua belah pihak serta termasuk dalam salah satu bentuk tolong menolong antar umat manusia. Berdasarkan firman Allah SWT dalam QS al-Maidah ayat 2:

Artinya:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya."87

Pelaksanaan kemitraan usaha ternak ayam broiler di Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan dilakukan oleh dua pihak yaitu peternak dan Poultry shop (perusahaan), Menurut fatwa DSN MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017, bahwa Shirkah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dan atau modal usaha (ra's al-mal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional.⁸⁸

Dalam bab sebelumnya, telah dijelaskan bahwa dalam kemitraan usaha ternak ayam broiler di Desa Simbatan kecamatan sarirejo Kabupaten Lamongan,

⁸⁷ Departemen Agama RI, *Al quran dan Terjemahannya* (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2005), 157.

⁸⁸ Fatwa DSN MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 diakses pada tanggal 26 mei 2018

peternak dan perusahaan telah bersepakatan untuk melakukan kemitraan secara tertulis. Bentuk pola kemitraan yang dilakukan merupakan kemitraan inti plasma dimana perusahaan sebagai inti dan peternak sebagai plasma. Perusahaan sebagai Inti menyedikan seluruh sarana produksi DOC, Pakan, Obat-obatan sedangkan peternak menyediakan kandang, tenaga kerja dan peralatan kandang lainnya yang dibutuhkan. plasma memperoleh keuntungan dari segi permodalan sedangkan inti diuntungkan karena dapat memasarkan hasil panen.⁸⁹

Seperti yang telah dipaparkan oleh penulis pada bab 2 Dalam suatu kerjasama diperlukan adanya suatu rukun dan syarat-syarat agar menjadi sah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun *Shirkah* yang harus ada dalam melakukan kerjasama antara dua orang atau lebih sebagai berikut:

- 1. Para pihak yang melakukan perjanjian *shirkah* (*al-'aqidain*)
- 2. Objek akad, yaitu modal, kerja dan keuntungan.
- 3. Sighat yaitu, Ijab dan Qabul.⁹⁰

Pada dasarnya, suatu akad dinyatakan sah apabila terdapat ijab dan qabul dari kedua belah pihak. Ijab merupakan pernyataan yang diikrarkan oleh salah satu pihak yang bekerja sama dalam akad *shirkah*. Sementara qabul adalah pernyataan kesediaan atas ijab yang ditawarkan oleh pihak pertama. Ijab dan qabul disyaratkan harus bertemu, artinya penawaran pihak pertama sampai dan diketahui dan disetujui oleh pihak kedua. Ungkapan kesediaan tersebut bisa

•

⁸⁹ Rofiq (peternak), Wawancara..., 08 November 2018

⁹⁰ Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika 1994), 76

diungkapkan dengan kata-kata atau gerakan tubuh (isyarat) lain yang menunjukkan kesediaan.⁹¹

Keuntungan dan kerugian yang dibagikan kepada kedua belah pihak haruslah sesuai dengan kesepakatan pada awal akad yaitu dihitung dari nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Dalam bab 2, penulis telah memaparkan bahwa terdapat beberapa syarat pokok *shirkah* menurut Usmani antara lain:⁹²

- 1. Syarat akad, hubungan yang dibentuk oleh para mitra melalui kontrak atau akad yang disepakati bersama, harus mempunyai empat syarat yaitu syarat berlakunya akad, syarat sahnya akad, dan syarat yang harus dipenuhi.
- 2. Pembagian proporsi keuntungan. Dalam pembagian proporsi keuntungan harus dipenuhi hal-hal berikut:
 - a) Proporsi keuntungan dibagikan kepada para mitra usaha harus disepakati di awal kontrak atau akad. Jika proporsi belum ditetapkan, akad tidak sah menurut Syariah.
 - b) Rasio atau nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha.
- 3. Penentuan proporsi keuntungan. Dalam menentukan proporsi keuntungan terdapat beberapa pendapat dari para ahli hukum Islam sebagai berikut:

⁹¹ Nasrun Haroen, Figh Muamalah..., 177.

⁹² Ascarya, Akad dan prooduk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 53

- a) Imam Malik dan Imam Syafi"i berpendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan.
- b) Imam Ahmad berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat pula berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan.
- c) Imam Abu Hanafiah, berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal pada kondisi normal. Namun demikian, mitra yang memutuskan menjadi sleeping partner, proporsi keuntungannya tidak boleh melebihi proporsi modalnya.
- 4. Pembagian kerugian. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa setiap mitra memegang kerugian sesuai dengan porsi investasinya. Oleh karena itu, jika seorang mitra menyertakan 40% modal maka dia harus menanggung 40% kerugian, tidak lebih, tidak kurang. Apabila tidak demikian, akad Syirkah tidak sah.
- 5. Sifat modal. Ahli hukum Islam berpendapat bahwa modal yang diinvestasikan oleh setiap mitra usaha dalam bentuk modal likuid. Hal ini berarti bahwa akad syirkah hanya dapat dengan uang dan tidak dapat dengan komoditas. Dengan kata lain, bagian modal dari suatu perusahaan harus dalam bentuk moneter (Uang).

6. Manajemen *shirkah*. Prinsip normal dari syirkah bahwa setiap mitra mempunyai hak untuk ikut serta dalam manajemen dan bekerja untuk usaha.⁹³

Berdasarkan uraian analisa diatas, jika dilihat dari sisi unsur-unsur akad, kemitraan usaha ternak ayam broiler di Desa Simbatan dapat dikategorikan termasuk dalam akad *syirkah.* hal ini terlihat dari terpenuhinya rukun *shirkah* pada kemitraan usaha ternak ayam broiler tersebut.

Dalam kemitraan usaha ternak ayam broiler di Desa Simbatan, perusahaan telah menentukan keuntungan bagi pihak peternak diawal akad sebelum usaha ternak ayam broiler dimulai yakni peternak mendapatkan keuntungan sebanyak 17.600/kg ayam broiler. Keuntungan tersebut sudah baku diawal tidak peduli apakah harga ayam dipasaran naik atau turun dan perusahaan mendapatakan keuntungan dengan memasarkan hasil panen ayam. Tetapi dalam akad kemitraan yang dibuat perusahaan tidak tertulis berapa keuntungan yang didapatkan perusahaan, ini mengakibatkan peternak tidak mengetahui berapa banyak keuntungan yang didapatkan perusahaan. Sedangkan apabila terjadi kerugian akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak 94

Di dalam syariat Islam, tidak menentukan mengenai besar kecilnya pembagian keuntungan pada akad *shirkah*, maka dalam hal ini menjadikan

.

⁹³ Ibid

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat.., 363-364.

⁹⁴ Bapak rofig (peternak), Wawancara..., 8 desember 2018

keleluasaan para pihak dalam melakukan transaksi kemitraan. Namun, dalam bermu'amalah prinsip keadilan sangatlah dijunjung tinggi.

Menurut Ulama Malikiyah dalam Nasrun Haroen, keuntungan disyaratkan harus jelas sesuai dengan kesepakatan akad. Akan tetapi, tidak diperbolehkan menetapkan jumlah tertentu bagi satu pihak dan sisanya bagi pihak lain. Seperti menetapkan keuntungan Rp.1.000,- bagi perusahaan dan sisanya bagi peternak.

Jika melihat dari uraian analisa diatas, maka dapat dipahami bahwa memang tidak ada ketentuan khusus mengenai besar kecilnya pembagian keuntungan akad *shirkah*. Akan tetapi, kedua belah pihak haruslah bertindak adil antara satu sama lain. Jika dikaitkan dengan kemitraan usaha ternak ayam broiler di Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan maka terdapat unsur ketidakadilan di dalamnya yaitu adanya penentuan keuntungan pada awal akad kepada pemilik modal. Sementara itu, rukun akad *shirkah* sendiri juga mensyaratkan untuk tidak menentukan keuntungan pada awal akad karena dapat membawa para pihak pada perbuatan riba. 96

B. Analisis Realisasi Akad Kemitraan Usaha Ternak Ayam Broiler Di Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan

Kemitraan harus dilandasi oleh rasa toleransi, saling menghormati dan rasa percaya satu sama lain. Keberhasilan suatu usaha kemitraan dapat terjalin baik

Q.

^{0.0}

⁹⁶ Ibid.,259

apabila masing-masing pihak dapat bersama-sama membangun usaha sesuai dengan etika bisnis yang ditentukan oleh adanya kepatuhan pihak yang bermitra. Prinsip utama dalam kerjasama adalah rasa saling membutuhkan, memerlukan dan saling menguntungkan agar kebutuhan kedua belah pihak dapat terpenuhi.

Dalam melakukan perikatan harus didasarkan pada asas keadilan dalam asas ini para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah dibuat dan memenuhi semua kewajiban. Berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Maidah:1:97

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.."

Perjanjian kemitraan usaha ternak ayam broiler di Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan adalah termasuk dalam akad *shirkah*. Namun, yang menjadi sebuah kejanggalan atau permasalahan dalam akad kemitraan usaha ternak ayam broiler ini adalah adanya penentuan harga per kg ayam sudah ditentukan pada awal akad kepada peternak sebelum bisnis berjalan. Dan peternak belum mengetahui berapa besar keuntungan diperoleh saat panen

-

⁹⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Rahman Mushaf Al quran Asmaul Husna* (Mikhraj Khazanah Ilmu: 2013),34

ayam. Sementara perusahaan akan mendapatkan keuntungan dari memasarkan hasil panen ayam.

Perusahaan mendapatkan keuntungan besar ketika harga ayam di pasaran melambung tinggi karena harga telah ditetapkan sesuai dengan harga kontrak. Penentuan ketetapan yang diberikan pihak perusahaan apabila harga di bawah kontrak maka harga ayam tetap memperhitungkan harga kontrak dan keuntungan peternak justru tidak sebanding dengan usaha yang dijalankan karena semua managemen pembudiyaan dan ketetepan keuntungan di tentukan oleh pihak perusahaan. Hal ini dapat menimbulkan adanya ketidakadilan keuntungan yang didapatkan oleh peternak.

Dalam hukum Islam, Pembagian presentase bagi hasil dalam Islam tidak harus sama, namun didasarkan pada kesepakatan bersama dan jelas besar kecilnya nisbah. bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti sepertiga, seperempat atau setengah. Tujuan diadakan kontrak kerjasama ialah memperoleh keuntungan. Maka jika salah satu pihak yang berkontrak tidak mengetahui besarnya nisbah maka kontrak tersebut tidak sah menurut syara'.

Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut menjadi fasid (rusak). 98 Fasid adalah akad yang telah memenuhi rukun akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad. Ketidaksahannya dapat disebabkan karena akad tersebut tidak sesuai dengan

.

⁹⁸ Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, 178.

praktek yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Suatu akad dapat dikatakan fasid apabila mengandung sifat yang tidak jelas dan dilarang oleh syara'. Contohnya, menjual mobil tanpa menyebutkan merk, tahun dan sebagainya.

Para fukaha menyatakan bahwa syarat sah akad adalah tidak terdapatnya 4 hal perusak sahnya (mufsid) dalam akad, diantaranya ketidakjelasan jenis yang dapat menyebabkan percekcokan, adanya paksaan, perkiraan, adanya unsur tipuan, serta terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad.

Jika melihat paparan diatas bahwa keuntungan dan kerugian dari pihak perusahaan tidak diketahui oleh peternak karena dalam sistem *shirkah* sendiri harus adanya transparansi atau keterbukaan keuntungan pihak perusahaan dan peternak Ketidakjelasan sendiri merupakan sesuatu yang dilarang dalam islam. Ibnu Taimiyah dalam jurnal Nadratuzzaman Hosen menjelaskan bahwa pelarangan ketidakjelasan didasarkan kepada larangan atas pengambilan harta/hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (bathil), ¹⁰⁰

Berdasarkan analisis penulis dapat disimpulkan bahwa praktik kemitraan usaha ternak ayam broiler di Desa Simbatan meskipun ada beberapa praktik yang sesuai dengan pendapat kalangan ulama, namun peneliti memandang praktik kemitraan usaha ternak ayam broiler di Desa Simbatan tidak sesuai dengan akad Syirkah. Dikatakan tidak sesuai karena praktik kemitraan usaha

.

⁹⁹ Saiful Jazil, Fiqih Muamalah..., 93.

¹⁰⁰ Nadratuzzaman Hosen, *Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi'*, *Vol.1 No.1*(Januari, 2009), 55.

ayam broiler yang terjadi di lapangan menggunakan sistem hasil yaitu keuntungan peternak hasil penjualan ayam dikurangi harga sapronak yg digunakan sedangkan perusahaan memperoleh keuntungan dari memasarkan hasil panen, tidak menggunakan sistem bagi hasil karena tidak ada yang dibagi, serta keuntungan dan kerugian dari pihak pemilik modal tidak diketahui oleh pengelola karena dalam sistem musyarakah sendiri harus transparansi atau keterbukaan keuntungan pihak pemilik modal dan pihak pengelola.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan, berikut kesimpulan yang didapatkan:

- 1. Sistem kemitraan usaha ternak ayam broiler di Desa simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan antara peternak dengan PT. Semesta Mitra Sejahtera berdasarkan pola kemitraan inti plasma dimana perusahaan sebagai Inti dan peternak sebagai Plasma. Kesepakatan kontribusi modal dari kedua belah pihak telah di sepakati di awal perjanjian kontrak. Dalam pelaksanaan kerjasama ternak ayam broiler perusahaan sebagai inti menyediakan sarana produksi berupa DOC, pakan, obat-obatan serta memberikan pembinaan teknis dan management kepada peternak, sedangkan plasma menyediakan kandang, tenaga kerja dan peralatan kandang lainnya yang dibutuhkan. Plasma memperoleh keuntungan dari segi permodalan sedangkan inti diuntungkan karena dapat memasarkan hasil panen
- 2. Menurut Hukum Islam, sistem kemitraan usaha yang dilakukan perusahaan dengan petenak ayam broiler tidak sesuai dengan akad *shirkah* dan menjadi fasid. Dikatakan tidak sesuai karena praktik kemitraan usaha ayam broiler yang terjadi di lapangan menggunakan sistem hasil yaitu keuntungan peternak hasil penjualan ayam dikurangi harga sapronak yg

terhutang sedangkan perusahaan memperoleh keuntungan dari memasarkan hasil panen, tidak menggunakan sistem bagi hasil karena tidak ada yang dibagi, serta keuntungan dan kerugian dari pihak pemilik modal tidak diketahui oleh pengelola karena dalam akad *shirkah* sendiri harus adanya transparansi atau keterbukaan keuntungan pihak perusahaan dengan peternak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka berikut saran yang dapat diberikan:

- Diharapkan kepada PT. Semesta Mitra Sejahtera melibatkan peternak (plasma) dalam penyusunan akad kemitraan.
- 2. Diharapkan di dalam akad perjanjian kemitraaan usaha ternak ayam broiler lebih diperjelas lagi.
- 3. Bagi peternak hendaknya dapat lebih bijak lagi dalam menyetujui isi Kontrak Perjanjian yang dibuat oleh pihak perusahaan, agar peternak dapat mendapatkan keuntungan yang sepadan dan tidak mendapatkan kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Abd Salam. *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam: Antara Fakta dan Realita.* Yogyakarta: LESFI, 2003.
- Ashari, M.Wahyunus. Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Usaha Ternak

 Ayam Potong di Desa Tanggul Wetan kecamatan Tanggul Kabupaten

 Jember Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000)
- Choirunnisa, Neneng. *Tinjauan HUkum Islam terhadap Kerjasama Budidaya Lele*antara Petani Dengan Pemasok bibit di Desa Tawangrejo Kecamatan Turi

 Kabupaten Lamongan, Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015.
- Fatwa DSN MUI No. 114/DSN-MUI/IX?2017 diakses pada tanggal 26 mei 2018
- Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah. Jakarta: Raja Grafino Persada, 2008.
- Huda, Qomarul. *Fiqih* Santoso, Hari dan Surdaryani, Titik. *Pembesaran Ayam Pedaging hari per hari di kandang Panggung Terbuka*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2009.
- Masri Singarimbun dan sofian Effendi, Metode penelitian survai. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Masruhan. Metodologi Penelitian Hukum. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

- Mariam Darus Badzrulzaman et al., *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016)
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2008.

Raco, J.R. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: grasindo, 2010.

Saiful Jazil, Fiqh Mu'amalah (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 63

Sonny Sumarsono, Metode Riset Sumber Daya Manusia. Graha ilmu, 2004.

- Suryana. Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Universitas Pendidikan Indonesia, 2010
- Tim penyelenggara penerjemah alquran. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd Ii Thiba'at al-Mushaf al-Syarif, 1418.
- Tim Penyusun Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, *Panduan Penulisan Skripsi*Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel
 Surabaya, 2016.

Rofiq, Ainur. Wawancara, Lamongan, 22 September 2018.

Bapak Dayat (petugas lapangan), Wawancara, Lamongan, 8 november 2018

Bapak Fahmi (peternak), Wawancara, Lamongan, 09 November 2018

Ibu Siti (peternak), Wawancara, Lamongan, 09 november 2018

www.lamongankab.go.id diakses pada 8 November 2018